

JOURNAL OF BUSINESS

ACCOUNTING

Investment
receivable
profits
accounts
investments
receivable
investments
receivable
investments
receivable



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Accounting & Finance

Journal of Business Accounting and Finance
Volume 4 No 1, April, 2022

Daftar Isi

No	Judul Artikel	Hal
1	The Effect Of Biological Asset Intensity And Green Accounting On The Financial Performance Of Agricultural Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange, 2017-2019 Dewi Linawati, Ayi Srie Yuniawati, Fanji Farman	1-10
2	The Effect of Inflation and Antam's Gold Price on Pt. Aneka Tambang Tbk Period 2018-2020 Usu Sumarni, Maman Nurachman, Shofia Annisa R	11-15
3	The Effect Of The Effectiveness Of Market Fees Management On Increasing Regional Levies In Sumedang Regency (Case Study In Bappenda Sumedang) Susanti Suhendar, Fahrul Alam Masruri, Lilis Kartika	16-21
4	The Effect of Service Quality and Information Systems for Rural and Urban Land and Building Tax Collection (PBB P2) on the Effectiveness of Pbb P2 Payments at the Conggeang District Office Dina Diandri, Tita Kartika, Gunawan Wibisana,	22-31
5	Effect of Internal Control System and Accounting Procedures on Inventory Management Arni Nuril Bisaroh, Lisna Lisnawati, Ahmad Andy Adinegara	32-37
6	Effect of Self Assessment System on Optimization of Income Tax Article 25 Corporate Taxpayers at the Sumedang Pratama Tax Service Office Rosi Imeyla, Nining Kurniasih, Tiana Feny Krisdina	38-45
7	The Effect of Auditor Competence and Independence on Audit Quality (Case Study at the Inspectorate in Sumedang Regency) Rita Yulianti, Erpi Rahman, Aa Kartiwa	46-50

The Effect of Biological Asset Intensity and Green Accounting On The Financial Performance Of Agricultural Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange, 2017-2019

Dewi Linawati¹, Ayi Srie Yuniawati², Fanji Farman³

¹²³Universitas Sebelas April Sumedang

abdewilinawati@gmail.com asyuniawati@stie11april-sumedang.ac.id, Fanjifarman2501@gmail.com

Article Info

Keywords:
*financial performance,
green accounting,
biological asset
intensity*

ABSTRACT

Financial performance is an analysis of the company's financial condition that has been achieved by the company from the past, a form of information for the present and the future. There are several things that can affect the company's financial performance. In this study, the researcher used green accounting and biological asset intensity. Green accounting is a new accounting paradigm that focuses on transactions, events, financial objects, social and environmental events, while biological asset intensity shows the size of the number of biological assets in the company. This study purposes to determine the effect of biological asset intensity partially on financial performance, partial effect of green accounting on financial performance, the relationship between biological asset intensity and green accounting, and the simultaneous influence of biological asset intensity and green accounting on the financial performance of agricultural companies. The research method used was a quantitative research method with a Multiple Linear Regression model, while the sampling technique in this study was a purposive sampling technique with a total of 18 samples. The results illustrated that Biological Asset Intensity did not partially affect the financial performance of agricultural companies, Green Accounting partially affected the financial performance of agricultural companies, there was no relationship between Biological Asset Intensity and Green Accounting, and Biological Asset Intensity and Green Accounting simultaneously affected the financial performance of agricultural companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved.

Corresponding Author:

Dewi Linawati¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: abdewilinawati@gmail.com

1. INTRODUCTION

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sector pertanian. Indonesia juga mempunyai kekayaan serta bentang alam yang melimpah, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kebanyakan dari bentang alam ini merupakan sumber daya yang berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang kehidupan bangsa Indonesia.

Kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah tidak menjadikan Indonesia terbebas dari yang namanya pemanasan global. Pemanasan global dan perubahan iklim yang kian ekstrim nyatanya menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang kian meningkat di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dapat meminimalisir terjadinya krisis lingkungan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis energi dan sumber daya yang bermula dari kerusakan alam.

KTT Bumi yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, menghasilkan kesepakatan para pemimpin dunia tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Yang isinya adalah memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun

hingga tahun 2012 diselenggarakan kembali KTT Rio+20, disadari bahwa konsep Pembangunan Berkelanjutan tersebut belum dijalankan di sejumlah negara termasuk Indonesia, dan kesadaran akan konsep tersebut masih rendah. Padahal apabila melihat konsep Ekonomi Berkeadilan yang dicanangkan sejak 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seharusnya konsep Pembangunan Berkelanjutan sudah berjalan di Indonesia karena sesuai dengan konsep Ekonomi Berkeadilan (*pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-green*) (Andreas Lako, 2014:4).

Masih rendahnya tingkat kesadaran dan penataan lingkungan pada perusahaan-perusahaan, serta munculnya kewajiban lain dalam Pembangunan Berkelanjutan melatarbelakangi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk membentuk sebuah kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Kebijakan tersebut bernama "PROPER". PROPER merupakan kepanjangan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan, yang mana merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Dibawah ini merupakan jumlah peringkat perusahaan program PROPER dari periode 2016-2017 sampai dengan periode 2019-2020.

Tabel 1. Jumlah Peringkat Perusahaan program PROPER
(Sumber data : <https://proper.menlhk.go.id/>)

Peringkat PROPER	Periode 2016-2017	Periode 2017-2018	Periode 2018-2019	Periode 2019-2020
Emas	19	20	26	19
Hijau	150	155	174	150
Biru	1.486	1.454	1.507	1.486
Merah	130	241	303	130
Hitam	1	2	2	1

Dari tabel di atas, dapat kita lihat perkembangan jumlah perusahaan yang mengikuti program PROPER dari tahun ke tahun. Untuk peringkat PROPER sendiri terdapat 5 (lima) peringkat dimulai dari Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Emas merupakan peringkat tertinggi yang berarti perusahaan tersebut telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Sedangkan hitam merupakan peringkat terendah yang berarti bahwa perusahaan belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan, dan beresiko untuk ditutup izin usahanya oleh KLH. Pola pembangunan nasional masih bertolak belakang dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didukung dengan pernyataan Prof. Andreas Lako dalam bukunya yang berjudul *Green Economy* (2014:2) dimana dalam pola pembangunan nasional, peningkatan profitabilitas pada perusahaan lebih diutamakan tanpa memperhatikan apa akibat yang didapat dari kegiatan tersebut. Dibalik profitabilitas perusahaan yang meningkat ada sumber daya alam dan lingkungan yang tidak diperhatikan dan di eksploitasi secara terus-menerus. Dampaknya meskipun disatu sisi pertumbuhan profitabilitas baik ekonomi negara/daerah dan perusahaan meningkat namun disaat yang bersamaan krisis sosial dan lingkungan juga meningkat. Apabila menganut pada konsep Pembangunan Berkelanjutan seharusnya peningkatan profitabilitas ini sejalan dengan peningkatan kinerja sosial-lingkungan. Januari 2020 lalu, diketahui dari sejumlah media elektronik Indeks saham sector agrikultur mengalami penurunan drastis. Hal tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh merebaknya *covid-19*. *Covid-19* menyebabkan para pelaku pasar khawatir pertumbuhan ekonomi global menurun, karena pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan permintaan terhadap komoditas-komoditas termasuk minyak sawit mentah/CPO (*crude palm oil*) juga akan turun. Selain itu, dilansir dari bisnis.com bahwa sejumlah BUMN sektor aneka industri dan pertanian rentan mengalami kebangkrutan, dan tidak menutup

kemungkinan bahwa perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek pun demikian. Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas sebuah perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dengan kata lain profitabilitas dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh profitabilitas ini dapat dihitung dengan data yang ada pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan perusahaan Agrikultur yang diproksi dengan ROA mengalami kemunduran tiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari angka yang ditunjukkan pada setiap perusahaan. ROA yang semakin kecil menunjukkan bahwa laba setelah pajak perusahaan tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan agrikultur mengalami kerugian setiap tahunnya. Komponen untuk menghitung ROA sendiri adalah laba bersih setelah pajak dan total aset dari perusahaan tersebut. Ini artinya, aset yang dimiliki perusahaan belum atau tidak mampu untuk membantu perusahaan menghasilkan laba, sehingga dapat kita lihat tingkat profitabilitas perusahaan agrikultur terus menerus mengalami penurunan.

Penurunan tingkat profitabilitas secara terus menerus yang dalam penelitian ini diproksi dengan ROA dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu perbedaan pengukuran dan pengakuan biaya yang salah satunya yaitu biaya lingkungan/biaya CSR (Andreas Lako, 2018:113). Selain itu tingkat profitabilitas (ROA) ini dapat dipengaruhi juga oleh total aset dari perusahaan tersebut. Karena indikator untuk perhitungan ROA sendiri melibatkan total aset yang didalamnya terdapat proporsi dari beberapa jenis aset yang salah satunya adalah aset biologis. Kedua hal tersebut didukung oleh penelitian dari Zulhaimi (2015), dan Maharani dan Falikhatun (2018). Hasil penelitian Zulhaimi (2015) menyatakan bahwa *Green Accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan hasil penelitian Maharani dan Falikhatun (2018) menunjukkan bahwa *biological asset intensity* berpengaruh secara simultan dengan variabel-variabel lainnya terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur.

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan untuk menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Yang salah satunya memuat tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Menurut POJK ini laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Green accounting atau yang biasa disebut dengan akuntansi hijau serta akuntansi lingkungan merupakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan serta masyarakat didalamnya. Dengan adanya *green accounting* diharapkan bahwa akuntan dan proses akuntansi tidak menyesatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan yang ramah lingkungan.

Green accounting dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan atau dalam hal ini profitabilitas perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah dengan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan dapat dilihat dari sejumlah perusahaan yang menerapkan CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan mereka beserta dengan dampak positif maupun negatifnya.

Sebagian laporan berkelanjutan perusahaan agrikultur dimuat dalam laporan berkelanjutan secara terpisah, sedangkan beberapa lainnya dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggungjawab ini termasuk tanggung jawab pada lingkungan, sosial-kemasyarakatan, serta bentuk tanggung jawab lain.

Perusahaan agrikultur sendiri mempunyai karakteristik yang dapat membedakannya dengan perusahaan lain. Ciri dari sebuah perusahaan agrikultur adalah adanya aset biologis. Menurut PSAK No. 69 tentang Agrikultur, aset biologis (*biological asset*) adalah hewan dan tanaman hidup. Sedangkan produk agrikultur (*agricultural produce*) adalah produk yang dipanen dari aset biologis

milik entitas. Untuk melihat seberapa besar perusahaan agrikultur menginvestasikan kekayaannya ke dalam bentuk aset biologis, ada yang dinamakan dengan intensitas aset biologis. Sebagai sebuah produk agrikultur, ada dua kemungkinan intensitas aset biologis pada perusahaan agrikultur yaitu dapat mempengaruhi dan tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan agrikultur. Rata-rata penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *biological asset intensity* menyatakan bahwa dengan *biological asset intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur. PSAK No. 69 sendiri berlaku efektif per 1 Januari 2018, sehingga bentuk penyesuaian sebagai akibat dari pemberlakuan tersebut yakni pada tahun 2017 disajikan kembali pada laporan 2018. Dari 21 (dua puluh satu) perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak mempunyai akun “Aset Biologis” pada laporan keuangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya perusahaan tidak menerapkan PSAK No. 69 tentang Agrikultur atau penerapannya yang belum sesuai.

2. LITERATURE STUDY

Teori Legitimasi

Teori legitimasi sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang berfokus pada *triple bottom-line* yakni *planet, people and planet* hal ini disebabkan oleh ekspektasi sosial yang tinggi. Dalam teori ini ditekankan bahwa organisasi atau entitas harus terlihat memperhatikan hak-hak publik secara luas, bukan hanya investornya saja. Berlatarbelakang dari kontrak sosial, melalui teori ini apabila entitas dianggap gagal memenuhi harapan masyarakat maka sanksinya dapat dijatuhkan oleh masyarakat itu sendiri contohnya dengan pembatasan hukum, atau pemboikotan terhadap produk secara terorganisir. Beberapa studi tentang Pengungkapan Sosial Lingkungan (PSL) telah menggunakan teori ini sebagai basis penjelasan PSL. diantaranya ada Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Imam Ghozali (2020) yang menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, mereka mengatakan: “Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”. Melalui teori ini, peneliti ingin melihat sejauh mana perusahaan dapat memenuhi ekspektasi sosial dengan tidak hanya mementingkan investor saja yang dalam hal ini fokusnya pada keuntungan entitas semata, namun juga dilihat dari aspek lingkungan dan sosial yang tertuang dalam konsep *green accounting* dan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Akuntansi Keuangan

Menurut sejarahnya akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494 oleh seorang matematikawan bernama Luca Paciolo dalam bukunya *Summa de Aritmatica*. Akuntansi sendiri menurut Zamzami dan Duta Nusa (2016:2) merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna. Pengguna informasi akuntansi dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal yang meliputi manajer, karyawan, investor, lembaga keuangan, pemerintah, pemasok, masyarakat dan media massa. Akuntansi terdiri dari beberapa bidang, diantaranya adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, dan akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah akuntansi keuangan. Menurut Kieso dkk. (2017:4) akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam pengertian tersebut dapat dilihat bahwa *output* dari proses akuntansi ialah laporan keuangan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan oleh peneliti sebagai sumber data dalam penelitian ini. Peneliti mengukur kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio dari laporan keuangan perusahaan yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan agrikultur yang menjadi populasi dalam penelitian, serta mengukur intensitas aset biologis dan melihat pengungkapan *green accounting* melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut PSAK No 01 tentang

Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Pihak eksternal diantaranya adalah investor, supplier, kreditor, pemerintah, masyarakat/publik. Laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi terkait dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja suatu perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi atau dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Berikut komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 01 Penyajian Laporan Keuangan (2014), meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- 6) Informasi komperatif.

Selaras dengan tujuan dari laporan keuangan sendiri yakni menyediakan informasi bagi para pengguna, pengguna atau yang kerap disebut sebagai pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Contohnya investor yang dapat melakukan analisis fundamental melalui laporan keuangan sebuah perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau melihat progres kinerja pada perusahaan yang bersangkutan.

Kinerja Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan ataupun kemampuan kerja. Sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk-beluk uang, urusan uang dan keadaan uang. Sehingga kinerja keuangan dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang telah dicapai perusahaan sebagai bentuk pencapaian dari masa lalu, dan bentuk informasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Irham Fahmi, 2017:2). Menurut Brigham dan Houston (2018:108), sistem pengukuran kinerja secara ringkas merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan analisis rasio. Rasio keuangan (*financial ratio*) menurut James C Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan juga diartikan sebagai kegiatan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. (Kasmir, 2019:104)

Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2017:46), rasio keuangan dan kinerja keuangan mempunyai hubungan yang erat. Sebuah rasio harus dapat menyajikan arah dari penggunaannya, hal tersebut dinamakan fleksibilitas dalam konsep keuangan yang berarti formula yang digunakan haruslah sesuai dengan kasus yang akan diselesaikan. Contoh investor akan menggunakan rasio yang paling sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan usaha perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, asset dan modal saham. Atau dalam kata lain rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. (Irham Fahmi, 2017:68). Sedangkan menurut Kasmir (2019:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio *profitabilitas* yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. ROA menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan total aset serta memberikan

gambaran dari efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh keuntungan. Peneliti memilih *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukuran kinerja keuangan ini karena *Return On Asset* (ROA) seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dan efisiensi aset untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Besar kecilnya tingkat *Return On Asset* (ROA), menunjukkan besar- kecilnya profitabilitas perusahaan yang bersangkutan.

Green Accounting

Andreas Lako (2018:81) mengatakan bahwa Akuntansi hijau merupakan paradigma baru dalam akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya tertuju pada transaksi, peristiwa, atau objek keuangan, tetapi juga pada objek, transaksi, atau peristiwa sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, akuntansi hijau merupakan proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi (Andreas Lako, 2018:99). Hyrslova dan Hajek (2007) dalam jurnal penelitian Lenggeng Prayitno dan Rachyu Purbowatu (2019), mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah. Dari kegiatan konservasi lingkungan ini pada akhirnya akan muncul biaya lingkungan (*environment cost*) yang harus ditanggung perusahaan. Akuntansi lingkungan dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan Wiwi Ratna Wangi dan Rini Lestari (2020) menjelaskan bahwa green accounting merupakan suatu proses akuntansi yang ditujukan terhadap transaksi keuangan, sosial, dan lingkungan secara terpadu sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan *green accounting* pada pelaporan keuangan tahunan perusahaan maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dengan menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya, serta dengan adanya pengungkapan semua biaya lingkungan baik internal maupun eksternal dapat mewujudkan akuntansi lingkungan yang terstruktur dan memberikan dampak baik pada kinerja lingkungan.

Aset Biologis

Ridwan (2011:9) berpendapat jika dihubungkan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh aset, maka aset biologis merupakan tanaman pertanian atau hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu. Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 69 (2018:2) menyatakan bahwa aset biologis merupakan hewan atau tanaman hidup yang memiliki aktivitas produktif. Aset yang dimiliki oleh perusahaan sektor agrikultur memiliki perbedaan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lain. Perbedaan tersebut diantaranya dapat dilihat dari adanya aktivitas atau transformasi biologis atas tanaman atau hewan di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa aset biologis ialah aset yang dimiliki perusahaan agrikultur yang berupa tanaman pertanian atau hewan ternak yang memiliki ciri-ciri yang khas dan berbeda dari aset lainnya disebabkan oleh transformasi biologis dari aset tersebut.

Biological asset intensity

Gonçalves dan Lopes (2014) menyebutkan bahwa *biological assets intensity* merupakan rasio antara aset biologis dan total aset. Di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai intensitas aset biologis dan merupakan rasio yang menunjukkan proporsi aset biologis dalam sebuah perusahaan. Atau dalam kata lain menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam bentuk aset biologis. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas aset biologis merupakan besarnya tingkat investasi suatu perusahaan dalam bentuk aset biologis.

3. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan kausal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dan diambil dari publikasi website bursa efek Indonesia maupun website perusahaan-perusahaan terkait berupa laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang telah dipublikasikan dari tahun 2017-2019, selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan menggali informasi dari berbagai sumber diantaranya yaitu artikel, jurnal, serta penelitian terdahulu. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu *Non Probability Sampling*. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2019:133).

4. RESULT AND DISCUSSION

Objek penelitian merupakan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan periode penelitian, terdapat 21 Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2019, sedangkan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* adalah 18 perusahaan yang dalam hal ini disebut objek penelitian. *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan data berdistribusi normal, nilai signifikansi (Asymp. Sig (2-tailed)) sebesar 0,200 yang berarti $0,200 > 0,05$ dan data dapat dikatakan normal. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF didapatkan nilai tolerance kedua variabel independen yaitu 0,962 yang berarti nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF untuk keduanya yaitu 1,039 yang berarti $VIF < 10$, artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas. Penelitian ini menggunakan Uji glejser. Dari hasil uji glejser tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,113 untuk *biological asset intensity* dan 0,139 untuk *green accounting*. Itu artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$. Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai DW (*Durbin Watson*) yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS, serta nilai Du dan nilai Dl dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson*. Dengan jumlah variabel 2 dan jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 54, diperoleh nilai Du sebesar 1,6383 dan Dl sebesar 1,4851.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai DW berada diantara nilai Du dan 4-Du yaitu $1,6383 < 2,021 < 2,3617$. Hal ini sesuai dengan kriteria bahwa untuk melihat terdapat masalah korelasi atau tidaknya nilai DW harus lebih besar dari Du dan lebih kecil dari 4-Du. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen *biological asset intensity* dan *green accounting* terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh koefisien untuk variabel independen *biological asset intensity* (X_1) = -0,335 dan *green accounting* (X_2) = -0,156 dengan konstanta sebesar 10,160, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh: Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi *Pearson Product Moment* pada SPSS, hubungan *Biological Asset Intensity* dengan *Green Accounting* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,159. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara *biological asset intensity* dan *green accounting*. Maka dengan demikian H_0 diterima dan menolak H_3 , artinya tidak ada hubungan antara *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2017 - 2019. Hubungan *biological asset intensity* dengan kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,723. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara *biological asset intensity* dengan kinerja keuangan. Sementara itu, hubungan *green accounting* dengan kinerja keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara *green accounting* dengan kinerja keuangan. Nilai koefisien sebesar -0,355 menunjukkan hubungan negatif, artinya jika semakin tinggi nilai *green accounting* maka semakin rendah nilai kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda, maka hasil uji koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square*. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,107. Artinya variabel independen (*biological*

asset intensity dan *green accounting*) mampu menerangkan variasi dalam variabel dependen (kinerja keuangan) dengan presentase sumbangan pengaruh sebesar 10,7% sedangkan sisanya sebesar 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil uji t untuk variabel *biological asset intensity* (X1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,930$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,357$. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-0,930 < 2,008$) dan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,357 > 0,05$). Maka dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa *Biological Asset Intensity* (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hasil uji t untuk variabel *green accounting* (X2) diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $-2,862$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,006$. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-2,862 < 2,008$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,006 < 0,05$). Maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jenis pengaruhnya adalah pengaruh negatif yang artinya pengaruh yang berlawanan. Uji F digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya pengaruh *biological asset intensity* dan *green accounting* secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja keuangan. Hasil Uji F yang diperoleh adalah sebagai berikut: Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil uji F untuk variabel *biological asset intensity* (X1) dan *green accounting* (X2) terhadap kinerja keuangan (Y) diperoleh hasil F_{hitung} sebesar $4,169$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,021$. Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4,169 > 3,179$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,021 < 0,05$). Maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2019.

Discussion

Pengaruh *Biological Asset Intensity* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur

Secara empiris, ditolak hasil pengujian antara *Biological Asset Intensity* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil pengujian antara *Biological Asset Intensity* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur menunjukkan bahwa *Biological Asset Intensity* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar intensitas aset biologis maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengukuran aset biologis dalam perusahaan yang belum sepenuhnya menggunakan nilai wajar sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur, sebagian perusahaan masih tidak dapat mengukur aset biologis dengan nilai wajar karena nilai wajar tidak dapat dihitung secara andal dan oleh sebab itu perhitungan aset biologisnya masih diukur dengan biaya historis. Sementara pengukuran aset biologis menggunakan nilai wajar dapat menciptakan volatilitas yang berpengaruh terhadap naik- turunnya harga aset yang berarti akan berpengaruh juga pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Maka berdasarkan hal tersebut H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Falikhatun (2018) yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara antara *biological asset intensity* dan kinerja keuangan dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gonçalves dan Lopes pada tahun 2015 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif antara *biological asset intensity* terhadap pengukuran nilai wajar aset biologis yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur

Berdasarkan hasil penelitian secara empiris, diterima hasil pengujian antara *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang menunjukkan bahwa *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Atau dengan kata lain H_0 ditolak sementara H_2 diterima. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *green accounting* dengan kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan *green accounting* akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, dan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Prof. Andreas Lako mengenai perkembangan *green accounting* di

Indonesia. Menurut Prof. Andreas Lako seharusnya pembebanan biaya- biaya lingkungan tidak dapat mengurangi laba perusahaan. Namun kenyataannya hal tersebut masih diberlakukan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga apabila biaya yang dibebankan perusahaan untuk lingkungan dan sosial bertambah maka laba yang dihasilkan perusahaan pun akan berkurang.

Hubungan *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting*

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris, hasil uji koefisien korelasi yang dilakukan terhadap *Biological Asset Intensity* dengan *Green Accounting* memberikan hasil tidak ada hubungan antara *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Berdasarkan pengujian yang dilakukan H0 diterima dan H3 ditolak. Artinya, sistem pengukuran aset biologis di perusahaan yang sebagian masih dengan biaya historis serta penerapan *green accounting* yang belum ideal menghasilkan tidak ada hubungan diantara keduanya atau dengan kata lain tingkat hubungan diantara keduanya adalah sangat rendah. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hubungan tidak langsung yang didapatkan secara etimologi dari kata agrikultur dan lingkungan, dimana *biological asset intensity* merepresentasikan agrikultur dan *green accounting* mewakili lingkungan. Selain hal tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian sejenis yang meneliti hubungan antara *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting*.

Pengaruh *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur

Secara empiris diterima hasil Secara empiris diterima hasil pengujian hipotesis variabel *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Berdasarkan hal tersebut didapatkan bahwa meskipun pengukuran dalam aset biologis masih belum sepenuhnya menggunakan nilai wajar dan *green accounting* diukur dengan pengungkapan lingkungan namun semakin besar *biological asset intensity* dan *green accounting* yang ada di perusahaan, akan semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agrikultur yang di proksi dengan ROA. Hasil tersebut tidak berlaku dalam pengujian parsial. Berdasarkan hasil pengujian, *biological asset intensity* dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur jika diuji secara bersama-sama dengan variabel lain. Begitupun sebaliknya, *green accounting* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur jika diuji secara bersama-sama dengan variabel lain. Baik *biological asset intensity* maupun *green accounting* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur jika dilakukan pengujian secara terpisah. Peneliti tidak dapat membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sejenis yang meneliti pengaruh secara simultan antara *biological asset intensity* dan *green accounting* terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian sejalan dengan teori yang digunakan peneliti yakni teori legitimasi dan akuntansi keuangan. Berdasarkan teori legitimasi, kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak publik secara luas dan tidak terbatas pada investor saja. Semakin besar tanggung jawab sosial yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan maka dapat mendorong perusahaan tersebut mendapat kepercayaan publik yang secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, berdasarkan teori akuntansi keuangan besar kecilnya intensitas aset biologis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

5. CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* dan untuk mengetahui pengaruh *Biological Asset Intensity* dan *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara empiris, terbukti bahwa *biological asset intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini disebabkan oleh metode pengukuran aset biologis yang sebagian masih menggunakan biaya historis karena nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Sementara

pengukuran dengan nilai wajar terhadap aset biologis dapat menciptakan volalitas dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1. Secara empiris, terbukti bahwa *green accounting* secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini disebabkan oleh penerapan *green accounting* di Indonesia saat ini yang belum ideal. Dimana biaya-biaya yang termasuk kategori biaya lingkungan masih diberlakukan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga apabila biaya yang dibebankan perusahaan untuk lingkungan dan sosial bertambah maka laba yang dihasilkan perusahaan pun akan berkurang.
2. Secara empiris, terbukti bahwa hasil uji koefisien korelasi yang dilakukan terhadap *biological asset intensity* dengan *green accounting* memberikan hasil tidak ada hubungan antara *biological asset intensity* dan *green accounting* pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Ini disebabkan oleh sistem pengukuran dari aset biologis dan *green accounting* itu sendiri. Aset biologis sebagian masih diukur dengan biaya historis sementara penerapan *green accounting* masih dilakukan dengan kurang ideal.
3. Secara empiris, terbukti bahwa *biological asset intensity* dan *green accounting* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Artinya baik *biological asset intensity* maupun *green accounting* jika dilakukan pengujian secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan maka akan mempengaruhi besar kecilnya kinerja keuangan perusahaan agrikultur.

REFERENCE

- Biologis, A., Kinerja, D. A. N. and Maharani, D. (2018) „Keuangan Perusahaan Agrikultur (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)”, XVII(2), pp. 10–22.
- Brigham dan Houston. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Call, D. A. N. et al. (2013) *Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana?*, pp. 978–979. Csr, R. et al. (no date) „Pengaruh kinerja lingkungan terhadap”, pp. 1–31.
- Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fitriani, A. (2013) „Anis Fitriani; Pengaruh Kinerja Lingkungan ...”, 1, pp. 137–148.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gon, R. (2015) „Accounting in Agriculture : Measurement practices of listed firms”, (March).
- Gonçalves, R. and Lopes, P. (2014) „Firm- specific determinants of agricultural financial reporting”; *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Elsevier B.V., 110, pp. 470–481. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.891.
- Haniffa, R. M. and Cooke, T. E. (2005) „The impact of culture and governance on corporate social reporting”, 24, pp. 391–430 doi:10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001. IAS (Internasional Accounting Standard). (t.thn.). 41-*Agrikultur*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 69: Agrikultur*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 01: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keuangan, D. A. N. K. (2009) „Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan”.
- Lako, Andreas. 2014. *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi*. Semarang: Erlangga.
- Lako, Andreas. 2018. *Akuntansi Hijau Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lingkungan, S. D. A. N. et al. (no date) „Sosial dan lingkungan”. Lu, L. W., Taylor, M. E. and Lu, L. W. (2018) „A study of the relationships among environmental performance ,environmental disclosure , and financial performance”. doi: 10.1108/ARA-01-2016-0010.
- Mariani, D., Utara, P. and Lama, K. (2017) „Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6 No . 2 Oktober 2017 FEB Universitas Budi Luhur ISSN : 2252 7141”, 6(2), pp. 141–160.
- Marta, A. and Ramos, R. (2015) „Environmental Accounting”.
- Masruri, F. A. 2018. *Analisis Rasio Profitabilitas dan Likuiditas dalam memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi yang terdaftar di BEI*.
- Mustafa, U. A. et al (2020) „Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening”, 6(03), pp. 508–520
- Purnomo, Rochmat A. 2016. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: Wade Group.
- Riduwan, dan Akdon. 2013. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. dan Bougie, Roger. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Agus dan Sugiyono. 2017. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Wangi, W. R. and Lestari, R. (2019), „Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan“, pp. 489–493.
- Weygant W, Keiso. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting*. Jakarta: Salemba Empat. Widarto, D., Mudjiyanti, R. and Purwokerto, U. M. (no date) „No Title“, pp. 76– 88.
- Brigham dan Houston. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- Website masing-masing perusahaan agrikultur diakses pada 24 Januari 2021
- Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) diakses pada 24 Januari 2021
- Dwi Martani (www.dwimartani.com) diakses pada 21 Februari 2021
- Ikatan Akuntan Indonesia (www.iaiglobal.or.id) diakses pada 24 Januari 2021
- PROPER (<https://proper.menlhk.go.id/>) diakses pada 7 Februari 2021

The Effect of Antam's Inflation and Gold Prices On Stock Prices PT. Aneka Tambang Tbk Period Year 2018-2020

Usu Sumarni¹, Maman Nurachman², Shofia Annisa R³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

Ususumarni22@gmail.com, mamanm295@gmail.com, sophiannisa92@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: financial performance, green accounting, biological asset intensity</p>	<p><i>The study aims to determine the effect of inflation on stock for the period of 2018-2020, to determine the effect of Antam gold prices for the period of 2018-2020. The study population is all reports of inflation, antam gold price and PT. Aneka Tambang Tbk stock price listed on the Indonesia Stock Exchange and the attached website that has been published. The result of the study is: (1) There is a not have a negative significant between inflation on stock prices (2) There is does not have a negative and significant effect between antam gold price on PT. Aneka Tambang Tbk stock price (3) There is a positive and significant between inflation and antam gold prices on PT. Aneka Tambang stock price</i></p>
<p>Corresponding Author: Dewi Linawati¹, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang. Email: abdewilinawati@gmail.com</p>	 <p>Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved.</p>

1. INTRODUCTION

Pasar modal adalah tempat untuk berinvestasi, yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga. Instrumen keuangan yang diperdagangkan didalam pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, reksadana dan lain- lain. Salah satu instrumen keuangan yang paling populer pada saat ini adalah saham. Saham menurut Bursa Efek Indonesia Saham menurut Bursa Efek Indonesia adalah merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang populer. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Peningkatan atau penurunan pasar modal dapat dilihat dari naik turunnya harga saham. Harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor mikro dan makro ekonomi.

PT. ANTAM didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. harga saham ditentukan dari harga nominal, harga perdana, harga pasar, harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, harga rata-rata, Widodoatmoio (2011:164). Seiring dengan penurunan harga saham antam , menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi bahwa tingkat inflasi pada akhir 2020 akan mencapai level 1,5 %. Bahkan juga dipredikasi menjadi yang terendah selama kurun waktu enam tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari inflasi pada November 2019 yang hanya 0,14%. Rendahnya inflasi ini disebabkan oleh permintaan atau konsumsi masyarakat yang melemah akibat pandemic COVID-19, dikutip dari berita VOI Indonesia. Berdasarkan idx.co.id harga saham PT. Aneka Tambang Tbk periode tahun 2018-2020 tidak mengalami kenaikan signifikan di tahun 2018-2019 atau malah cenderung stabil. Namun di awal tahun 2020 sampai menjelang akhir tahun, terjadi penurunan harga saham PT. Aneka Tambang. Dikutip dari CNBC Indonesia, Harga emas batangan produksi PT. Aneka Tambang Tbk turun pada perdagangan. Emas satuan pun dibanderol Rp.893.120/gram atau turun 0,22%, sedangkan emas Antam satuan 1 gram

turun 0,21% ke level Rp. 951.000/batang dan berada pada level terendah sejak 27 Juli 2020 lalu. Seiring dengan melemahnya harga emas penjualan emas pun meroket. Namun dalam idxchannel.com saat penjualan emas meroket, saham antam justru mengalami penurunan pada penutupan perdagangan. Saham antam turun 1,36% ke Rp. 1.085 dimana frekuensi perdagangan sebanyak 26.554 kali. Jenis-jenis Penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi dan harga emas tersebut terhadap harga saham PT Aneka Tambang khususnya pada periode 2018-2020. Karena dari data diatas menggambarkan adanya hubungan antara tahun penelitian ketika harga saham PT. Aneka Tambang menurun, harga emas cenderung mengalami kenaikan dan tingkat inflasi mengalami penurunan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Inflasi dan Harga Emas Antam Terhadap Harga Saham PT. Aneka Tambang Tbk (Periode 2018-2020).

2. LITERATURE STUDY

Pasar Modal

Pasar modal merupakan indikator perekonomian suatu negara, pasar modal memberikan fasilitas untuk mempertemukan antara pihak-pihak surplus dana (surplus fund) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit fund) dalam kerangka investasi. Dalam perputaran roda perekonomian, sumber – sumber pembiayaan merupakan punggung pengembangan usaha (bisnis).

Saham

Ketika membeli saham berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kamaludin (2011) mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

Makro Ekonomi

Makroekonomi menurut Nursalam (2019:1) mencangkup masalah – masalah pokok yang dihadapi perekonomian yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidak stabilan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi

Harga Emas Dunia

Menurut John Pratama (2017:10) emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Emas memiliki sifat tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya, karena hal itu emas disebut sebagai bahan mulia. Standar internasional untuk harga emas dunia tidak dinilai dengan gram. Namun menggunakan satuan troy ounce atau yang biasa ditulis 1 Oz t yang setara dengan 31.1034768 gram, Ryan dan Fahmi (2015:6). Untuk menghitung harga per gram emas dunia dapat menggunakan rumus :

1 gram emas dunia = Harga emas dunia (US Dolar) x kurs

Inflasi

menurut Ahmad Mukri dan Syarifah (2020:156) inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara umum yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga nilai uang turun, sebanding dengan kenaikan harga- harga. Inflasi dapat dihitung dengan rumus, Irham Fahmi (2011:189) : $CPI = CP \times 100 / BPP$

Keterangan :

CPI : Consumer Price Indeks atau Indeks Harga Konsumen

CP : Current Price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode berlangsung atau berjalan

BPP : Base Period Price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat dari periode dasar.

3. METHOD

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam desain penelitian kausalitas. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Lokasi penelitian adalah laporan harga saham PT. Aneka Tambang yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia dan diakses melalui situs www.idx.co.id. Data inflasi perbulan dari tahun 2018 – 2020 diakses dari www.bi.go.id dan data mengenai harga emas diakses dari www.kitco.com. Waktu penelitian dimulai pada saat peneliti mengajukan riset untuk penelitian yaitu dimulai dari bulan Januari 2021 – selesai. Menurut Silaen (2018:23) mengungkapkan desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Definisi operasional menurut Prof. Dr. Patrisius (2015:19) adalah pengertian sebuah variabel dalam istilah yang bisa diamati, bisa diuji, atau bisa dijadikan angka. Definisi operasional mengandung penjelasan / spesifikasi mengenai variabel yang telah diidentifikasi, pengukuran variabel, dan skala/ukuran yang digunakan, Muchlis dan Sri (2009:155). Pada penelitian ini yang menjadi sumber penelitian adalah harga saham PT. Aneka Tambang, data inflasi dan harga emas yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, www.bi.go.id, www.kemenag.go.id dan www.kitco.com.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi data harga saham PT. Aneka Tambang Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan website resmi masing- masing variabel independen. Studi kepustakaan adalah sebagai landasan teoritis dalam pembahasan penelitian. Tahap ini mempelajari tentang teori dan konsep dari literatur – literatur yang relevan dengan masalah yang diajukan. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang didalamnya terdapat variabel independen (variabel penjelas) dan variabel dependen (variabel yang dijelaskan) dalam suatu persamaan.

4. RESULT AND DISCUSSION

Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham

Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yaitu $|-3,533|$ dengan $t_{tabel} = 2,036$, jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $|-3,533| > 2,036$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham.

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial, untuk pengaruh Inflasi diperoleh nilai $|-1.695| < 2,034$, dan nilai signifikannya sebesar $0,099 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020.

Pengaruh Harga Emas Antam Terhadap Harga Saham

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara parsial, untuk pengaruh harga emas antam terhadap harga saham diperoleh nilai $|-1,796| < 2,034$, dan nilai signifikannya sebesar $0,082 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial harga emas antam tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham pada PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020.

Pengaruh Inflasi, dan Harga Emas Antam Terhadap Harga Saham Secara Simultan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara simultan, untuk pengaruh inflasi dan harga emas antam terhadap harga saham diperoleh nilai $1,676 > F_{tabel} 3,28$, dan nilai signifikannya sebesar $0,203 <$

0,05. Hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan inflasi, dan harga emas antam berpengaruh terhadap harga saham PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020.

5. CONCLUSSION

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh maupun hasil analisa atau pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh inflasi dan harga emas antam terhadap harga saham PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2018-2020 sebagai berikut:

- a. Pengaruh inflasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham pada PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020, dibuktikan dengan hasil uji t untuk variabel inflasi yaitu thitung $|-1,695| < t_{tabel} 2,034$ dan dengan nilai signifikannya sebesar $0,099 > 0,05$.
- b. Pengaruh harga emas antam tidak berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham pada PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020, dibuktikan dengan hasil uji t untuk variabel harga emas dunia yaitu thitung $|-1,796| < t_{tabel} 2,034$ dan dengan nilai signifikannya sebesar $0,082 > 0,05$.
- c. Pengaruh inflasi dan harga emas antam secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham PT. Aneka Tambang Tbk periode 2018-2020, dibuktikan dari hasil uji f dengan nilai Fhitung $1,676 < F_{tabel} 3,28$, dan nilai signifikan $0,203 < 0,05$.
- d. Variabel harga saham ditentukan oleh variabel inflasi dan harga emas antam sebesar 9,2%, dibuktikan dari hasil koefisien determinasi dengan nilai R-Square sebesar 0,092. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada perusahaan maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan agar lebih berhati-hati ketika terjadi perkembangan makroekonomi yang fluktuatif sehingga dapat mempertahankan kondisi perusahaan dan kinerja saham nya.
- b. Bagi Investor-investor PT. Aneka Tambang hendaknya memperhatikan pergerakan dari tingkat inflasi dan harga emas antam, karena variabel tersebut menunjukkan adanya pengaruh terhadap harga saham PT. Aneka Tambang Tbk setelah dilakukan pengujian atau penelitian ini.
- c. Bagi Peneliti peneliti sebaiknya menambah variabel lain atau memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan maksimal.

REFERENCE

- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. Pengantar Pasar Modal. PT. Asdi Mahasatya. Jakarta
- Bringham, Eugene dan J.F Houston. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi II. Salemba Empat. Jakarta
- Darmaji, Tjipto dan Fakhrudin. 2011. Pasar Modal di Indonesia Edisi 3 Salemba Empat. Jakarta
- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta. Bandung
- Filbert, Ryan dan Fachmi Jaidi, 2015. Gold Trading Revolution. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Femilia, Ika dan Smart Teachers Team, 2019. Bongkar Pola Soal UNBK SMA/MA IPS 2020. PT. Buku Seru. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23, Edisi 8. Universitas Diponegoro. Semarang
- , 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21, Update PLS Regresi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hartono, Prof. Dr. Jogiyanto, 2017. Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesebelas. BPFE-Yogyakarta.
- Jere, Jefferson, Naning Sudjatmoko. 2013. Shopping Saham Modal Sejuta. PT. Flexmedia Komputindo. Jakarta
- Kamaludin. 2011. Manajemen Keuangan. Mandar Maju. Bandung
- Nor, Hadi. 2015. Pasar Modal. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nursalam. 2019. Buku Ajar Makroekonomi. Deepublish Publisher. Yogyakarta
- Pratama, John. 2017. Rahasia Kaya Dengan Investasi Emas & Dinar. Klik Publishing. Jakarta
- Samsul, Muhamad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Erlangga. Surabaya
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA, CV. Bandung
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi Edisi Pertama. Kanisius. Jakarta
- Widoatmojo, Sawidji. 2012. Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Edisi Revisi. PT. Jurnalindo Aksara Grafika. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 1768/MK/IV/12/1974 tentang Penerapan Modal Perusahaan Perseroan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Y.A. 5/170/4 tanggal 21 Mei 1975

Retrived www.idx.co.id (diakses pada 05 Januari 2021, 19.00 WIB)

Retrived [Retrived www.kitco.com](http://www.kitco.com) (diakses pada 08 Januari 2021, 08.00 WIB)

Retrived www.bi.go.id (diakses pada 08 Januari 2021, 11.00 WIB)

[Retrived www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) (diakses pada 12 Januari 2021, 20.00 WIB)

The Effect of The Effectiveness of Market Retribution Management on Increasing Regional Retributions in Sumedang Regency

Susanti Suhendar¹, Fahrul Alam Masruri², Lilis Kartika²

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

susantisuhendar54@gmail.com, fahrulalam@stie11april-sumedang.ac.id, imeldakartika38@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the effectiveness of market retribution management on increasing regional levies at Bappenda Sumedang Regency. The method used in this study is a quantitative method with a survey research method approach. The population in this study were 87 market levy taxpayers. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained from questionnaires (google form) and from literature studies. Data analysis methods used data quality test, coefficient analysis, analysis simple linear regression, and hypothesis testing processed using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that the Effectiveness of Market Retribution Management has a positive and significant effect on increasing regional or individual fees partially or individually, this is indicated by the value of $t_{count} 4,588 > t_{table} 1,988$ with a significance level $0.000 < 0.05$.

Keywords:

Effectiveness, Market Retribution, Regional Retribution



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved

Corresponding Author:

Susanti Suhendar,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Jawa Barat 45323 Telp (0261) 205524
Email: susantisuhendar54@gmail.com

1. INTRODUCTION

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional, dinyatakan bahwa retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan.

Untuk retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi pasar. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No 66 Tahun 2001 Retribusi pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan pasar fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyedia alat-alat pemadam kebakaran. Sejalan dengan itu, Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara efektif, misalnya dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya yaitu dari retribusi pasar. Hal ini juga didasari semakin banyaknya masyarakat yang melakukan peluang tersendiri bagi daerah dalam rangka memperoleh pendapatan dalam jumlah yang lebih besar di masa yang

akan datang untuk membiayai pembangunan daerah, artinya semakin besar dana dipungut dari hasil retribusi pasar, maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan penerimaan retribusi pasar ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumedang perlu memanfaatkan potensi yang ada di pasar agar bisa dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan sehingga retribusi pun meningkat. Perkembangan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2020
(Sumber: Bappenda Sumedang (data diolah), tahun 2021)

Tahun	Target Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Persentase (%)
2016	641,570,280.00	541,193,300.00	84,29%
2017	641,570,280.00	605,120,050.00	94,32%
2018	584,688,040.00	581,488,250.00	99,41%
2019	583,116,900.00	557,229,000.00	95,56%
2020	296,649,520.00	460,736,500.00	155,31%

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menetapkan target retribusi pasar tahun 2016 sebesar Rp 641.570.280 dan realisasinya sebesar Rp 541.193.300 dan di tahun 2019 - 2020 terjadi peningkatan signifikan dengan target retribusi pasar sebesar Rp296.649.520 dan realisasi penerimaan retribusi pasar sebesar 460.736.500, persentase tahun 2019–2020 naik sebesar 37,75%. Pengelolaan retribusi pasar Kabupaten Sumedang belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan retribusi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan potensial pasar maupun upaya Pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pasar tersebut belum bisa dikatakan baik dan terintegrasi.

2. LITERATURE STUDY

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar

Menurut Mahmudi (2015: 86), efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta berhasil tidaknya suatu organisasi tujuan dan target- targetnya. Rasio efektivitas dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu dan data anggaran atau target penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu pendapatan yang diterima atas target yang ditetapkan pemerintah. Target penerimaan retribusi pasar yaitu target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan realisasi pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau kepentingan umum ataupun orang pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung (Marhot 2016:6). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. METHOD

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui metode penelitian yang tepat dan relevan (Sugiyono 2016:2). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang merupakan data yang berupa angka atau kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realita permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, proses pengukuran adalah bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Sumber data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan keterangan, gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam kategori huruf atau bagian bilangan. Penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder. Variabel ini sering disebut sebagai variable stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2018:39). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan telah tercapai, serta berhasil tidaknya suatu organisasi tujuan dan target- targetnya (Mahmudi,2015: 86). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen (variabel y) dalam penelitian ini adalah peningkatan retribusi daerah. Peningkatan retribusi daerah adalah peningkatan pendapatan daerah yang diambil dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot 2016:6). Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan tersebut dilakukan beberapa tehnik pengumpulan data (2017:224). Dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. Sugiyono (2018:82) menyatakan Proba bility Sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin. Suatu model regresi linier dapat disebut model yang baik, apabila model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik tersebut terdiri dari uji normalitas. Adapun analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Uji normalitas data berguna untuk mengetahui apakah variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smimov* dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2013:32) yang dikutip oleh Maulana (2015) analisis uji *Kolmogrov – Smirnov* dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian. Sugiyono (2018:188) analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (diubah – ubah). Regresi sederhana adalah sebagai pengaruh antara dua variabel saja, dimana hanya terdiri atas independen /bebas untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen (X) yaitu efektivitas retribusi pasar dengan satu variabel dependen (Y) yaitu pendapatan asli daerah. Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Variabel dengan keterangan sebagai berikut :

Y = nilai yang diprediksikan

a = kontanta atau bila harga

X = 0

b = koefisien regresi

X = nilai variabel independen

4. RESULT AND CONCLUSSION

Berdasarkan perhitungan dari 87 sampel yang digunakan hasil perhitungan skor total untuk variabel Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar (X) adalah 70,1% yang berada dalam kategori Tinggi. Jadi penilaian responden mengenai Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar (X) secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori Tinggi karena Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada kantor BAPPENDA Kabupaten Sumedang telah berjalan sesuai harapan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar secara keseluruhan indikator – indikatornya berada pada kategori tinggi. Dimana tingkat efektivitas dihitung dengan menggunakan kuisioner yang memiliki beberapa poin masing – masing tergantung dengan bobot nilai kuisioner tersebut, dan hasil yang didapatkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar tergolong sudah efektif karena persentase yang dihasilkan diatas 70%. Semakin tinggi nilai kuisioner maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan retribusi pasar. Maka dari itu sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan retribusi pasar, pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan pasar untuk para pedagang serta meringankan tarif retribusi pasar. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pasar secara keseluruhan indikator – indikatornya berada pada kategori tinggi.

Peningkatan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan perhitungan dari 87 sampel yang digunakan, hasil perhitungan skor total untuk variabel Peningkatan Retribusi Daerah (Y) adalah 70,5% yang berada dalam kategori Tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Afriansyah (2016) dalam hasil penelitiannya terdapat nilai kuisioner yang cukup tinggi yaitu diatas 70% yang menyatakan bahwa peningkatan retribusi daerah berada dalam kategori tinggi. Peningkatan retribusi daerah yang tinggi ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Sumedang. Namun diperlukannya juga perhatian pemerintah yang lebih besar dalam memfasilitasi para pedagang sehingga kesadaran pedagang akan membayar retribusi akan lebih tinggi dan tentu saja akan menambah pendapatan daerah yang lebih besar.

Pengaruh Efektivitas Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Retribusi Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang

Hasil uji hipotesis ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,588 > 1,988$ dan nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0.05 maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak sehingga diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan efektivitas terhadap peningkatan retribusi daerah di Kabupaten Sumedang.

5. CONCLUSSION

Berdasarkan hasil analisis data tentang Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan karena mayoritas responden menyatakan telah memenuhi sebagian besar karakteristik dari indikator- indikator Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar yang telah ditentukan. Namun lembaga terkait (BAPPENDA) harus lebih meningkatkan dalam meyakinkan masyarakat untuk dapat memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Peningkatan retribusi daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang perlu dipertahankan karena mayoritas responden menyatakan telah memenuhi sebagian besar karakteristik dari indikator- indikator Peningkatan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Namun lembaga terkait (BAPPENDA) harus lebih meningkatkan dalam kualitas pelayanan kepada subyek retribusi daerah.

3. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah pada BAPPENDA Kabupaten Sumedang menunjukkan (Rs) sebesar 0,199, artinya bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variasi perubahan variabel terikat sebesar 19,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar yang diangkat pada penelitian ini memiliki nilai dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dan dari perhitungan dengan menggunakan faktor korelasi nilai t hitung sebesar 4,588 dengan tingkat signifikan 5% untuk n= 87, nilai t tabel sebesar 1,988. Maka nilai thitung > t tabel (4,588 > 1,988). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu “Adanya Pengaruh Antara Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah” dapat diterima.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Bagi BAPPENDA untuk melakukan penarikan retribusi pasar lebih tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Perlu diperhatikannya mengenai pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pembayaran retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas bahasan mengenai penelitian ini, diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi daerah.

REFERENCE

- Ali Uradi Alka, 2020. Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.
- Dharma Hammam, 2016. Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- Sri Murniati, Dwi Kasasih, 2017. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
- Sutri Handayani, 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.
- Umayu Dwi Lestari, 2020. Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo.
- Ninuk Dwiastuti, 2018. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
- Rachmad Afriansyah, 2016. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Barat
- Haw. Widjaja, 2017. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Rosemery Elsy, 2016. *Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Tunggul
- Anshari, 2017. Ilmu Hukum Pajak. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bandung : Alfabeta.
- Windhu Putra, 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.
- Perda Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Retrieved Website <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah.r> pada 21 Februari 2021.
- Retrieved Website https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf. Diakses pada 28 Juni 2021

The Influence of Service Quality and Information Systems for Rural and Urban Land and Building Tax Collection (PBB P2) on the Effectiveness of P2 PBB Payments at The Congeang Kecamatan District Office

Dina Diandri¹, Tita Kartika², Gunawan Wibisana³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

dinadiandri389@gmail.com, tita@stie11april-sumedang.ac.id gunawanwibisanamkn@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

The core problem of this research is the effectiveness of the payment of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) at the Congeang District Office, Sumedang Regency. The purpose of this study was to determine how much influence the quality of service and information systems for collecting Land and Building Tax (PBBP2) on the effectiveness of PBB P2 payments at the Congeang District Office, Sumedang Regency. This study uses quantitative methods. The number of samples in this study were 100 respondents using the method of random sampling. The analysis used is multiple linear regression analysis. Data processing using the SPSS for windows 25 program. The results of this study indicate that the quality of service and information systems for Rural and Urban Land and Building Tax (PBBP2) has a significant effect on the effectiveness of PBB P2 payments in Congeang District, Sumedang Regency. This is indicated by the regression equation $Y = 12,516 + 0,154X_1 + 0,539X_2 + 3,427$. The probability value is less than 0.05 and the calculated f value is greater than f table, the results of the coefficient of determination test to determine the amount of contribution provided by the service and information system for Rural and Urban Land and Building Tax (PBBP2) on the effectiveness of (PBBP2) payments of 46.9%. Then according to the t -test the quality of service has a significant effect on the effectiveness of PBB P2 payments seen from t count $>$ t table ($1.685 > 1.660$) and the information system for Rural and Urban Land and Building Tax (PBBP2) has a significant effect on the effectiveness of PBB P2 payments seen from t count $>$ t table ($7.172 > 1.660$).

Keywords:

Service Quality,
Information System,
Effectiveness Of
Paying



Copyright © 2022 Journal of Business Accounting and Finance. All rights reserved

Corresponding Author:

Dina Diandri¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: dinadiandri389@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik untuk menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang membuat Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Negara lainnya. Aspek yang utama adalah ekonomi. Pemerintah pada hakekatnya dibentuk tidak hanya untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi pemerintah juga mengupayakan kesejahteraan rakyat yang makmur dan berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam memainkan perannya, anggaran sangat menentukan kuat lemahnya pemerintahan suatu Negara. Pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Menurut Kompas (2020) Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada periode Agustus

2020 mencapai 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 6.076,9 triliun (kurs 14.700). Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang begitu besar, diharapkan pajak menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan Negara sampai saat ini, penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Untuk mensukseskan pemungutan pajak sesuai target yang ada, maka aparat perpajakan dituntut semakin mampu dan selalu melakukan pembenahan, baik dalam perangkat hal hukum, prosedur dan peralatan teknis pendukung lainnya. Lebih-lebih pada aspek moral dan semangat unsur manusianya yang langsung terkait dalam proses pemungutan pajak. Atau dengan kata lain, bahwa diperlukan upaya-upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemungutannya. Pada perkembangan teknologi saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merancang berbagai teknologi informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2-P2) yang merupakan aplikasi sistem informasi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berintegrasi dengan tempat pembayaran, selain itu informasi yang ada dalam database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di setiap Kantor Pelayanan PBB P2 yang terletak di Pelayanan Satu Tempat (PST). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah, semakin menarik untuk dikaji mengingat jenis pajak ini bersifat meluas dengan sebagian besar rakyat atau penduduk sebagai subjeknya. Tidak ada sejangkal tanahpun yang luput dari jangkauan pajak ini, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Era otonomi kedepan, Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi salah satu sumber yang cukup potensial bagi pembiayaan pemerintah daerah. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Berdasarkan observasi awal, penulis mengamati tentang efektivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) pada kantor Kecamatan Conggeang, kesimpulan dari wawancara dengan salah satu petugas PBB P2 menyatakan bahwa target penerimaan PBB P2 belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pajak dan sistem informasi ataupun aplikasi pembayaran pajak. Dan hasil wawancara dari salah satu wajib pajak yang ada di daerah Kecamatan Conggeang menyatakan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi dari petugas pajak kepada wajib pajak, kurang responsifnya pelaksanaan pelayanan pajak, serta dimasa pandemi covid-19 saat ini menjadi salah satu alasan mengapa wajib pajak telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2). Sebagaimana pada tabel 1.1 yang menjelaskan tentang target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi PBB P2 di Kecamatan Conggeang
(Sumber : Kantor Kecamatan Conggeang ,2021)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
2016	465.417.221	457.930.693	7.486.528	98,4%
2017	556.771.787	551.234.524	826.379	99,9%
2018	942.945.246	942.945.246	-	100%
2019	1.175.609.425	1.170.517.401	5.092.024	99,7%
2020	1.333.547.640	1.181.153.731	52.393.909	88,6%

Berdasarkan tabel 1 bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 penerimaan PBB P2 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 penerimaan PBB P2 mengalami penurunan, disebabkan oleh adanya kekeliruan, mutasi objek baru, adanya lahan tower, tanah pemerintah, tidak ada objek, dan pada pandemi Covid-19 saat ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat maupun penghasilan dari pihak perusahaan, hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak terealisasinya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2). Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum optimal. Pelayanan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak dan target penerimaan PBB P2 tidak tercapai.

2. LITERATURE STUDY

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menyatakan hubungan atau sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (prinsipal) (Hamdani, 2016: 30). Investor atau pemegang saham akan memberikan kontrak kepada manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajer berperan penting dalam pengambilan setiap keputusan di perusahaan. Tujuan utama adanya agency theory tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak- pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya agensi (agency cost) sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori agensi juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak- pihak yang menjalin kerjasama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan berbeda termasuk dalam menjalankan tanggungjawab untuk mengelola suatu perusahaan. Dimana satu atau lebih orang disebut prinsipal meminta orang lain yang disebut agent untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal.

Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Negara. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Seligman (Rahayu, 2017 : 25) menyatakan bahwa, “Taxis compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred”. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berkeberatan atas without reference karena bagaimanapun juga uang- uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. Beberapa pengertian di atas menyebutkan bahwa pajak sebagai contribution dan nonpenal transfer of resources diartikan sebagai iuran dan pungutan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2 P2) Mardiasmo (2018: 363) menyatakan bahwa, “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994”. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Kualitas Pelayanan

Sistem pemungutan pajak berdasarkan Self Assesment yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Hal ini berarti kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya berada pada wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui

peningkatan kualitas pelayanan. Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan khususnya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2). Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat (Pandiangan, 2008: 5). Menurut Pararusman (Nurdin, 2019: 20), ada lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atau pelayanan, yaitu.

Tangibles, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan personil dan bahan komunikasi.

Reliability, kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya dan tepat.

Responsiveness, kemampuan untuk membantu pelanggan dan penyedia pelayanan yang tepat.

Assurance, pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Emphaty, perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan.

Sistem Informasi PBB P2

Pada perkembangan teknologi saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merancang berbagai teknologi informasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2-P2) yang merupakan aplikasi sistem informasi PBB P2 terintegrasi dengan tempat pembayaran, selain itu informasi yang ada dalam database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di setiap Kantor Pelayanan PBB P2 yang terletak di Pelayanan Satu Tempat (PST).

Rusdiana (2014: 28) menyatakan bahwa kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu system, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu, bisa diartikan sekelompok elemen independen, namun saling terkait sebagai satu kesatuan. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Leitch dan Davis (Prasojo, 2013: 6) mendefinisikan Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung organisasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pradana (2016) merangkum bahwa Dimensi sistem informasi dibagi menjadi empat bagian, yaitu aktifitas manajemen, kualitas informasi, struktur keputusan dan aplikasi sistem informasi. Keempat dimensi tersebut memiliki beberapa definisi serta klasifikasi masing-masing, berikut ini adalah definisi serta klasifikasi dari setiap dimensi.

1. Aktifitas Manajemen, sistem informasi terkadang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas yang didukungnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa pengelompokan pada level manajemen. Menurut Ebert dan Griffin (Rusdiana, 2014:23), pengelompokannya mencakup sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi taktis, sistem informasi strategis.
2. Kualitas Informasi, istilah kualitas informasi (quality of information) terkadang juga dipakai untuk menyatukan informasi yang baik. Menurut Burch dan Grudnitski (Rusdiana, 2014 : 23), kualitas informasi dapat diartikan sebagai pilar-pilar dalam bangunan dan menentukan baik tidaknya pengambilan keputusan. Kualitas informasi dapat dilihat berdasarkan relevansi, ketepatan waktu, dan keakurasian.
3. Struktur Keputusan, menurut Simon (Rusdiana, 2014: 25) bahwa suatu keputusan merupakan bagian dari suatu rangkaian proses pengambilan keputusan. Ada keputusan terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Keputusan terstruktur berasal dari permasalahan dan kejadian- kejadian yang terstruktur. Permasalahan atau keputusan bisa distrukturisasikarena sifatnya rutin sehingga bisa ditentukan sebelumnya. Keputusan tidak terstruktur berasal dari permasalahan yang sifatnya tidak bisa di prediksi karena tidak jelas rutinitasnya, sehingga seolah-olah baru atau mungkin memang benar baru atau bisa juga karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus beda dari umumnya.
4. Efektivitas Pembayaran PBB P2, Sudrajat (2017) merangkum bahwa kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari

dan produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sondang (2010: 24) yang menjelaskan bahwa, “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Adapun dimensi dari efektivitas adalah Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat suatu rencana, Tersedia sarana dan prasarana kerja, Pelaksanaan yang efektif dan efisien, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

3. METHOD

Agar penelitian lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang merupakan data yang berupa angka atau kuantitatif yaitu pencarian data atau informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survei, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Metode survei menurut Kerlinger (Sugiyono, 2019: 56) menyatakan bahwa. Survey Research studies large and small population (or universes) by selecting and studying samples chosen from the population to discover the relative incident, distribution, and interrelations of sociological and psychological variables”. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Hasil dari survei tersebut akan digunakan sebagai alat penjelasan juga sebagai data penguat deskriptif. Menurut Sugiyono (2019: 69) variabel independen sering disebut juga sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu Variabel X1 dan Variabel X2 (Kualitas Pelayanan dan Sistem Informasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

4. RESULT AND DISCUSSION

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang berada di kaki Gunung Tampomas, oleh karena itu tidak heran jika wilayah Kecamatan Conggeang subur akan air bersih. Kecamatan Conggeang berbatasan langsung dengan kecamatan Buahdua, Ujungjaya dan Paseh. Kecamatan Conggeang berjarak 20 km dari Kabupaten Sumedang dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Jumlah desa di Kecamatan Conggeang sebanyak 12 Desa, diantaranya yaitu Desa Jambu, Desa Narimbang, Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeh, Desa Pada Asih, Desa Babakan Asem, Desa Ungkal, Desa Cacaban, Desa Conggeang Wetan, Desa Conggeang Kulon, Desa Karanglayung, dan Desa Cibubuan. Total luas wilayah Kecamatan Conggeang adalah sekitar 6536,00 m² dan area lainnya sekitar 1260 m². Pada tahun 2020 jumlah penduduknya sebanyak 33.394 orang, dengan kepadatan penduduk sebanyak 275 jiwa/km². Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor Kecamatan Conggeang adalah sebanyak 42.449 wajib pajak (SPPT) yang tercatat. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak (SPPT) sebanyak 100 orang. kuesioner yang digunakan atau disebar sebanyak 100 kuesioner atau sebesar 100%. Dari kuesioner yang disebar terbagi atas beberapa kelompok atau karakteristik yaitu menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 48% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang atau sebesar 52%. Responden berdasarkan umur dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 17-30 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 23%, umur 31-44 tahun sebanyak

19 orang atau sebesar 19%, selanjutnya berumur 45-58 tahun sebanyak 45 orang atau sebesar 45%, dan terakhir yang berumur 59 tahun keatas sebanyak 13 orang atau sebesar 13%. Responden berdasarkan jenis pendidikan untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 7 orang atau sebesar 7%, jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 31 orang atau sebesar 31%, jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 27 orang atau sebesar 27%, jenjang pendidikan Diploma sebanyak 13 orang atau sebesar 30%, jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, dan jenjang Magister sebanyak orang atau sebesar 2%. Responden berdasarkan jenis pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang atau sebesar 14%, Karyawan Swasta sebanyak 25 orang atau sebesar 25%, Wirausaha sebanyak 18 orang atau sebesar 18%, Petani sebanyak 40 orang atau sebesar 41%, dan lain- lainnya sebanyak 10 orang atau sebesar 10%.

Skor total untuk variabel kualitas pelayanan pajak adalah 4.028, penilaian secara keseluruhan yang H dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori baik karena skor harapan berada pada jarak 3.400 – 4.200. Interpretasi data variabel kualitas pelayanan pajak memiliki skor nilai 4.028 sehingga memiliki posisi antara kategori Cukup Baik (3.400) dengan kategori Baik (4.200) namun lebih mendekati kategori Baik dan berdasarkan kriteria penilaian berada pada kategori Kuat atau sebesar 80,56%. Hal ini berarti wajib pajak memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi mengenai kualitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada kantor Kecamatan Conggeang yang sudah Baik.

Skor total untuk variabel Sistem Informasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2 P2) adalah 4.163, penilaian secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori baik karena skor harapan berada pada jarak 3.400 – 4.200. Interpretasi data variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 memiliki skor atau nilai 4.163, sehingga memiliki posisi antara kategori Cukup Baik (3.400) dengan kategori Baik (4.200) namun lebih mendekati kategori Baik dan berdasarkan kriteria penilaian berada pada kategori kuat atau sebesar 83,26%. Hal ini berarti wajib pajak memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi mengenai sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah baik.

Skor total untuk variabel Efektivitas pembayaran PBB P2 adalah 4.125, penilaian secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori baik karena skor harapan berada pada jarak 3.400 – 4.200. Interpretasi data variabel efektivitas pembayaran PBB P2 memiliki skor atau nilai 4.125, sehingga memiliki posisi antara kategori Cukup Baik (3.400) dengan kategori baik (4.200) namun lebih mendekati kategori baik dan berdasarkan kriteria penilaian berada pada kategori kuat atau sebesar 82,50%. Hal ini berarti wajib pajak memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi mengenai efektivitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang sudah efektif dan sudah Baik.

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25.0 bahwa variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai thitung sebesar 1.685 dan nilai sig 0,003, apabila dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel dilihat dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh ttabel 1.660. Maka $1.685 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan PBB P2 terhadap efektivitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang.

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25.0 menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 diperoleh nilai thitung sebesar 7.172 dan nilai sig 0,000, apabila dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel dilihat dari tabel distribusi t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh ttabel 1.660. Maka $7.172 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 terhadap efektivitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang. Hasil output menunjukkan nilai Fhitung sebesar 44.738 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ apabila dibandingkan dengan Ftabel. Nilai Ftabel dapat dilihat dengan rumus $F_{tabel} = (k : n - k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (variabel bebas) sementara n adalah jumlah responden sehingga $F_{tabel} = (2 : 100 - 2) = (2 : 98)$, maka diperoleh Ftabel 3,09 karena nilai signifikan $0,000 <$

0,05, dan 44,738 > 3,09 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima (H_0 ditolak) yang artinya kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan PBB P2 berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang.

Discussion

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini juga didukung dengan teori dimana pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Negara. Pajak menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah pada hakekatnya dibentuk tidak hanya untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi pemerintah juga mengupayakan kesejahteraan rakyat yang makmur dan berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam memainkan perannya, anggaran sangat menentukan kuat lemahnya pemerintahan suatu Negara. Definisi kualitas pelayanan menurut keputusan MENPAN No.63/2003 (Mulyana 2016 : 19) adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tertentu peraturan perundang-undangan. Pranadita (2016) "Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia". Pada perkembangan teknologi saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merancang berbagai teknologi informasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2-P2) yang merupakan aplikasi sistem informasi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terintegrasi dengan tempat pembayaran, selain itu informasi yang ada dalam database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di setiap Kantor Pelayanan PBB P2 yang terletak di Pelayanan Satu Tempat (PST). Jayinudin (2018) menyatakan bahwa "Sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) merupakan suatu sistem yang dapat mengolah data menjadi sebuah informasi dengan cara mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan sekaligus menyetorkan ke kas Negara". Sedangkan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari dan produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sondang (2010: 24) yang menjelaskan bahwa, "efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".

2. Secara Empiris

Berdasarkan data yang ada, penelitian ini memiliki sampel sebanyak 100 responden, dengan pemilihan sampel menggunakan teknik random sampling. Dari hasil uji instrumen penelitian yaitu hasil uji validitas semua data dinyatakan valid dan berdasarkan hasil uji reliabilitas semua data dinyatakan reliabel dengan nilai reliabilitas kualitas pelayanan PBB P2 sebesar 0,919, nilai reliabilitas sistem informasi pemungutan PBB P2 sebesar 0,925 dan nilai reliabilitas efektivitas pembayaran PBB P2 sebesar 0,886 yang berarti lebih besar dari 0,70. Berdasarkan skor total atau kriterium untuk variabel kualitas pelayanan PBB P2 (X_1) adalah 4.028 atau dalam kriteria Baik dari skor harapan 5.000. Jadi penilaian responden mengenai kualitas pelayanan PBB P2 secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori Kuat atau sebesar 80,56%, karena kualitas pelayanan PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang sudah

sesuai dengan harapan. Berdasarkan skor total atau kriterium variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 (X2) adalah 4.163 atau dalam kriteria Baik dari skor harapan 5.000. jadi penilaian responden mengenai sistem informasi pemungutan PBB P2 secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya beradapada kategori kuat atau sebesar 83,26%, karena sistem informasi pemungutan PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang sudah sesuai dengan harapan.

Berdasarkan skor total atau kriterium variabel efektifitas pembayaran PBBP2 (Y) adalah 4.125 atau dalam kriteria Baik dari skor harapan 5.000. jadi penilaian responden mengenai sistem informasi pemungutan PBB P2 secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator- indikatornya berada pada kategori kuat atau sebesar 82,50%, karena sistem informasi pemungutan PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang sudah sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan yaitu uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa antara variabel dependen dengan variabel independen tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian ini, kemudian hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi berganda dan uji analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa variabel independen berhubungan positif terhadap variabel dependen, variabel kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan PBB P2 berhubungan secara positif terhadap variabel efektifitas pembayaran PBB P2 dengan derajat hubungan korelasi yang kuat, dilihat dari hasil perhitungan pada tabel 4.54 diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan efektifitas pembayaran PBB P2 sebesar 0,693 atau 69,3% ada pada interval 0,600 – 0,799. Dari hasil output uji determinasi menunjukkan besarnya nilai adjusted R Square adalah 0,469 atau 46,9% variasi efektifitas pembayaran PBB P2 dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan PBB P2. Sedangkan sisanya ($100\% - 64,9\% = 35,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai Standar Error Of The Estimate (SEE) sebesar 2.514. Hasil perhitungan hipotesis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 1.685 dan nilai sig 0,003, apabila dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel dilihat dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh ttabel 1.660. Maka $1.685 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa Ho ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan PBB P2 terhadap efektifitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang Variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 7.172 dan nilai sig 0,000, apabila dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel dilihat dari tabel distribusi t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh ttabel 1.660. Maka $7.172 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa Ho ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 terhadap efektifitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang. Berdasarkan hasil perhitungan Uji F (simultan) menunjukkan nilai F hitung sebesar 44.738 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Jadi model regresi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan PBB P2 berpengaruh terhadap efektifitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap efektifitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang secara parsial dan simultan dapat diterima.

CONCLUSSION

Berdasarkan hasil analisis data tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sistem Informasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Efektivitas Pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang, maka dapat ditarik kesimpulan. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pembayaran PBB P2, karena berdasarkan Uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai thitung sebesar 1.685 dan nilai sig 0,003, apabila dibandingkan dengan ttabel. Nilai ttabel dilihat

dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh $t_{tabel} = 1.660$. Maka $1.685 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak, hal ini berarti apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan mengakibatkan efektivitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang akan semakin meningkat.

Sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembayaran PBB P2, karena berdasarkan Uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pemungutan PBB P2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7.172 dan nilai sig 0,000, apabila dibandingkan dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dilihat dari tabel distribusi t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel, sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh $t_{tabel} = 1.660$. Maka $7.172 > 1.660$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak, hal ini berarti apabila sistem informasi pemungutan PBB P2 semakin baik maka akan mengakibatkan efektivitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang akan semakin meningkat.

Kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 46,9% berada kategori cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembayaran PBB P2. Hal tersebut ditunjukkan dengan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 44.738 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ apabila dibandingkan dengan F_{tabel} . Nilai F_{tabel} dapat dilihat dengan rumus $F_{tabel} = (k : n - k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (variabel bebas) sementara n adalah jumlah responden sehingga $F_{tabel} = (2 : 100 - 2) = (2 : 98)$, maka diperoleh $F_{tabel} = 3,09$ karena nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan $44,738 > 3,09$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima (H_0 ditolak) yang artinya kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan PBB P2 berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran PBB P2 pada kantor Kecamatan Conggeang.

Dari hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan efektivitas pembayaran PBB P2 sebesar 0,693 atau 69,3% ada pada interval 0,600 – 0,799. Jadi dapat dikatakan ada kaitan yang kuat antara kualitas pelayanan, sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan efektivitas pembayaran PBB P2. Berikut tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sistem Informasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Efektivitas Pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang. Untuk hal tersebut peneliti memberikan saran, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Kantor Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, adapun saran tersebut sebagai berikut. Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan penampilan fasilitas fisik (sarana prasarana), peralatan, personal, dan alat komunikasi kantor, dan mempertahankan kemampuan dan kesopanan pegawai kantor Kecamatan Conggeang serta kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan masyarakat. Dalam era digital sekarang ini pembayaran Pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bisa dengan mudah dilakukan dengan bayar melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal tersebut tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pajak dan sistem informasi pemungutan pajak, oleh karena itu peneliti memberikan saran supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT). Efektivitas pembayaran PBB P2 ditingkatkan lagi agar perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan wajib pajak yang tercermin dan ketepatan waktu, kemampuan dan kesopanan pegawai kantor Kecamatan Conggeang serta kecepatan, dan ketepatan dalam

menghadapi permintaan, pertanyaan dan mempertahankan pengetahuan tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemampuan pegawai kantor Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sangat baik.

Saran Akademis Saran akademik penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis atau sama dan bisa dijadikan acuan yang mendukung penelitiannya bahkan dapat dijadikan penelitian lebih lanjut khusus mengenai konsep teori yang mendukung pengetahuan dalam dunia pendidikan ekonomi terutama akuntansi, khususnya pengaruh kualitas pelayanan dan sistem informasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap efektivitas pembayaran PBB P2 pada Kantor Kecamatan Conggeang.

REFERENCE

- Angela, Ria Resti. 2014. "Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di KPP Pratama Bangkinang Kabupaten Kampar". *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Asbar, Akromi Khairina. 2014. "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sanapelan Pekanbaru". *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 1, 2, 1-15, Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit di Universitas Diponegoro.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- Jayinudin. 2018. "Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Pada Kantor Kecamatan Cileunyi Bandung Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000 Berbasis Client Server". *Jurnal Ilmiah*, 3, 1, 288-300, *Accounting Information System and Information Technology Business Enterprise*.
- Manossoh, Hendrik. 2016. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia, Bandung.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. C.V. Andi Offset, Yogyakarta.
- . 2018. *Perpajakan*. C.V. Andi Offset, Yogyakarta.
- Masruroh Siti, dan Zulaikha. 2015. "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)".
- Mulyana, Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. UNPAD Press, Bandung.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Kualitas pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Media Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Palabuan, Trinomika Take. 2015. "Pembuatan Sistem Informasi Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Postgre SQL (Studi Kasus di Desa Pakisaji, Kabupaten Malang)".
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pradana, Mahir. 2016. "Perencanaan Skema Sistem Informasi untuk Aktivitas Manajemen". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bismis*, 4, 1, 65- 71, Universitas Telkom Bandung.
- Pranadata, I Gede Putu. 2016. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Batu".
- Prasojo, Lantip Diat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. UNY Press, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Rusdiana. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Sondang P, Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. PT. Tarsito, Bandung.
- Sudrajat, Yogi. 2017. "Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB P2) terhadap Efektivitas Pembayaran PBB P2 Pada KPP Pratama Kediri". Universitas Nusantara PGR Kediri.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA, Bandung.
- . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Sumedang nomor 110 tahun 2015 pasal 4 tentang kelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Tipe A.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke- empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/10/15/110905326/naik-utang-indonesia-pada-agustus-2020-tembus-rp-6076-triliun> [diakses pada tanggal 25 Januari 2021]

<https://www.aplikasipemda.com/sistem-informasi-manajemen-pajak-bumi-dan-bangunan-web/amp/> [diakses pada tanggal 25 Januari 2021]

<https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-pembayaran-PBB-P2/> [diakses pada tanggal 17 Februari 2021]

<https://www.aplikasipemda.com/aplikasi-pembayaran-PBB-P2/> [diakses pada tanggal 17 Februari 2021]

Effect of Internal Control System and Procedure Inventory Management Accounting

Arni Nuril Bisaroh¹, Lisna Lisnawati², Ahmad Andy Adinegara³
^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang
aminurilbisaroh@gmail.com, aulyalisna@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Keywords:

*System Internal Control,
Procedures Accounting,
and Inventory
Management*

Along with the development of the times, the progress of science and technology is experiencing increasingly rapid changes which make the awareness of health knowledge higher. This makes the Puskesmas, which is a health organization, strive to provide the best and quality services. One of the factors that play a role in the quality of Puskesmas services is the management of drug supplies carried out by the Puskesmas. It is very important to manage the supply of drugs and medical materials to prevent stock outs and overstocks in purchasing drugs and medical materials. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2016 regulates pharmaceutical service standards at Puskesmas including the management of pharmaceutical preparations. The management is one of the pharmaceutical service activities, which starts from planning, requesting, receiving, storing, distributing, destroying and withdrawing, controlling, administration (recording and reporting) as well as monitoring and evaluation.



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved

Corresponding Author:

Arni Nuril Bisaroh¹,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Jawa Barat 45323 Telp (0261) 205524
Email: aminurilbisaroh@gmail.com

1. INTRODUCTION

Seiring dengan perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan yang semakin pesat yang membuat semakin tingginya kesadaran terhadap pengetahuan mengenai kesehatan. Hal ini membuat Puskesmas yang merupakan organisasi kesehatan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas. Salah satu faktor yang berperan terhadap mutu pelayanan Puskesmas adalah pengelolaan persediaan obat yang dilakukan oleh Puskesmas. Pengelolaan persediaan obat dan bahan medis sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan (*stock out*), kelebihan (*over stock*) dalam melakukan pembelian obat dan bahan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas termasuk didalamnya pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan tersebut merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusi, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi (pencatatan dan pelaporan) serta adanya pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan obat dan bahan medis di Puskesmas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, maka ketika adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tepat akan menjadi masalah tumpang tindih anggaran dan pemakaian yang tidak tepat. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PSAP : 5). Agar persediaan stabil maka ditetapkan jumlah dan jenis item yang dibutuhkan untuk dapat menentukan jumlah minimal persediaan dalam suatu periode tertentu. Pengelolaan persediaan obat dan

bahan medis habis pakai di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (pelayanan kesehatan dasar) seperti Puskesmas yang memiliki peranan yang sangat signifikan. Pengelolaan persediaan obat di Puskesmas bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat dan bahan medis yang efisien, efektif, dan rasional. Tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji sistem pengendalian internal secara parsial mempunyai pengaruh terhadap persediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cimalaka.
2. Untuk menguji prosedur akuntansi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap persediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cimalaka.
3. Untuk menguji ada dan tidaknya hubungan atau korelasi antara sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi terhadap pengelolaan persediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cimalaka.
4. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap persediaan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cimalaka.

2. LITERATURE STUDY

1. Teori Stakeholder

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu dari tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (Stakeholders). (Gray et all, 2001 dan Lutfi 2013) menyatakan bahwa *stakeholders* adalah pihak- pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para *stakeholders* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders* kepada perusahaan tersebut. Teori *stakeholders* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). *Stakeholders theory* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi *stakeholders*.

2. Audit

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Randal J. Elder (Dalam Sukrisno Agoes, 2017 : 28) mendefinisikan auditing sebagai akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kopenten dan independen.

3. Pengelolaan Persediaan Obat dan bahan Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 mengatur tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas termasuk didalamnya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan tersebut merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

4. Sistem Akuntansi Persediaan

Menurut Mulyadi (2016 : 463) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutase setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem return penjualan, sistem pembelian, sistem return pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi.

5. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016 : 129) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Sugiyono (2018: 149) menyatakan bahwa, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. maka peneliti menggunakan sampel jenuh. Sugiyono (2018: 156) menyatakan bahwa, sampel jenuh adalah teknik sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Jadi sampel adalah seluruh karyawan pada Puskesmas Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 60 orang. Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, perilaku, atau orang dari lapangan yaitu dengan cara wawancara secara terbuka antara peneliti dengan semua staf pada Puskesmas Cimalaka Kabupaten Sumedang. Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari catatan pihak lain. Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan, dan buku-buku.

4. RESULT AND DISCUSSION

Teknik uji yang digunakan untuk mengetahui apakah instrument yang telah disusun dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan data atau tidak maka digunakan teknik korelasi melalui koefisien korelasi *Product Moment*. Setelah diperoleh jawaban responden pengendalian internal (X1), prosedur akuntansi (X2) dan pengelolaan persediaan obat (Y), maka selanjutnya melakukan pengujian validitas terhadap item-item pernyataan yang telah ditabulasi dan diubah kedalam bentuk angka sesuai dengan *skala liker*. korelasi antara masing- masing indicator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil nilai r tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dari variabel sistem pengendalian internal, prosedur akuntansi, dan pengelolaan persediaan dinyatakan valid. Pada uji reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan *Cronbach's alpha* > 0,6. Berikut rangkuman hasil uji reliabilitas atas variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 25. Dapat dilihat bahwa semua pernyataan dalam kuesioner mengenai variabel sistem pengendalian internal, prosedur akuntansi, dan pengelolaan persediaan adalah reliabel/handal. Hasil olah data diatas diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : $Y = 3,524 + 0,465 X_1 + 0,892 X_2 + e$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 3,524. Hal ini berarti bahwa jika sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan persediaan, maka tingkat pengelolaan persediaan tetap sebesar 3,524.
- b) Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,465, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal jika bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka pengelolaan persediaan obat akan bertambah sebesar 0,465.
- c) Nilai koefisien regresi prosedur akuntansi sebesar 0,892, menunjukkan bahwa jika prosedur akuntansi bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka pengelolaan persediaan akan bertambah sebesar 0,892.

Uji Koefisien Determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel bebas dalam penelitian menjelaskan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Sistem Pengendalian internal dan Prosedur Akuntansi sedangkan variabel dependennya adalah Pengelolaan

Persediaan. Hasil perhitungan determinasi dengan menggunakan SPSS 25, dapat dilihat pada tabel berikut:

besarnya pengaruh sistem pengendalian internal (X1) terhadap Pengelolaan Persediaan (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,795 atau 79,5%. Jadi sistem pengendalian internal (X1) memberi pengaruh terhadap pengelolaan persediaan (Y) sebesar 79,5%. Sedangkan $100\% - 79,5\% = 20,5\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Besarnya pengaruh prosedur akuntansi (X2) terhadap pengelolaan Persediaan (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,760 atau 76%. Jadi prosedur akuntansi (X1) memberi pengaruh terhadap pengelolaan persediaan (Y) sebesar 76%. Sedangkan $100\% - 76\% = 24\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Besarnya pengaruh sistem pengendalian internal (X1) dan prosedur akuntansi (X2) terhadap pengelolaan persediaan (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,895 atau 89,5%. Jadi sistem pengendalian internal (X1) dan prosedur akuntansi (X2) memberi pengaruh terhadap pengelolaan persediaan (Y) sebesar 89,5%. Sedangkan $100\% - 89,5\% = 10,5\%$. Lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Discussion

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Persediaan

Berdasarkan hasil uji normalitas data variabel sistem pengendalian internal berdistribusi normal. Dari hasil uji regresi linier berganda didapatkan nilai Koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,465, maka nilai pengelolaan persediaan bertambah sebesar 0,465. Koefisien regresi tersebut positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan adalah positif. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai Sig untuk Sistem Pengendalian Internal adalah 0,000. Maka $0,000 < 0,05$ jadi hipotesis (H1) sistem pengendalian internal signifikan terhadap pengelolaan persediaan. Sedangkan nilai t_{tabel} untuk jumlah sampel 60 dengan tingkat signifikansi 5% adalah 2,002. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} $8,574 > t_{tabel}$ 2,002). Maka hipotesis Sistem pengendalian internal (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan persediaan (Y). Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Ri'yati Najiyah, dkk 2020) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan persediaan obat.

2) Pengaruh Prosedur Akuntansi Terhadap Pengelolaan Persediaan

Berdasarkan hasil uji normalitas data variabel prosedur akuntansi berdistribusi normal. Dari hasil uji regresi linier berganda didapatkan nilai Koefisien regresi prosedur akuntansi sebesar 0,892, maka nilai pengelolaan persediaan bertambah sebesar 0,892. Koefisien regresi tersebut dinilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah positif. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai Sig Prosedur Akuntansi adalah 0,000. Maka $0,000 < 0,05$ jadi hipotesis (H2) prosedur akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan persediaan. Sedangkan nilai t_{tabel} untuk jumlah sampel 60 dengan tingkat signifikansi 5% adalah 2,002. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} $7,374 > 2,002$. Maka hipotesis prosedur akuntansi (X2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan persediaan (Y). Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Deddy Ardiansyah, dkk 2020) prosedur akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan persediaan obat.

3) Hubungan sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi terhadap pengelolaan persediaan

Berdasarkan grafik di atas, terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linier dan positif antara variabel sistem pengendalian internal (X1) dan prosedur akuntansi (X2) terhadap pengelolaan persediaan (Y). Hubungan positif ini dapat bermakna bahwa jika sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi mengalami peningkatan maka pengelolaan persediaan akan meningkat pula.

4) Pengaruh sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi terhadap pengelolaan persediaan

Berdasarkan dari hasil uji serentak pada kedua variabel yaitu sistem pengendalian internal dan prosedur akuntansi terhadap pengelolaan persediaan menjelaskan bahwa besarnya nilai F_{hitung} adalah 242,847, sedangkan besaran signifikasinya adalah 0,000. Signifikansi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hasil perhitungan uji F pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{tabel} $N_1 = K-1 = 3-1 = 2$, $N_2 = n-k = 60-3 = 57$ adalah 3,16 sedangkan F_{hitung} sebesar $242,847 > 0,000$ Secara empiris, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) terhadap variabel Pengelolaan Persediaan (Y) Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Cimalaka Kabupaten Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Prosedur Akuntansi Terhadap Pengelolaan Persediaan (Studi Empiris Pada Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Cimalaka Kabupaten Sumedang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang linear dan positif antara variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) terhadap variabel Prosedur Akuntansi (X2) terhadap variabel Pengelolaan Persediaan (Y) Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Cimalaka Kabupaten Sumedang. Secara empiris, hasil menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Prosedur Akuntansi (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Persediaan (Y) obat dan bahan medis habis pakai pada Puskesmas Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Akademis

- 1) Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang untuk memperluas dan memperbanyak sampel penelitian serta Memperbaharui periode pengamatan.
- 2) Bagi peneliti berikutnya dimasa yang akan datang dapat menggunakan tambahan metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang objektif, misalnya melalui wawancara.

2. Praktis

- a. Agar struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas dan terpenuhinya praktik yang sehat, sebaiknya fungsi penerimaan terpisah dari fungsi gudang, hal ini disarankan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan penerimaan obat dan bahan medis dari pencatatan jurnal oleh bagian bendahara satuan kerja. Maka dari itu, Puskesmas dapat membuka lowongan pekerjaan pada bidang apoteker khususnya guna mengurangi perangkapan tugas yang sedang terjadi.
- b. Melakukan pelatihan atau sosialisasi terhadap pentingnya sistem pengendalian internal yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan obat dan bahan medis habis pakai kepada karyawan yang ada di Puskesmas Cimalaka.
- c. Melakukan studi banding pada Puskesmas lain untuk mengetahui apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, agar dijadikan sebagai contoh untuk Puskesmas Cimalaka kedepannya.

REFERENCE

- Aulia Tri Rizky, D. a. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-obatan Pada Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau.
- Deddy Ardiansyah, M. Y. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Prosedur Akuntansi Terhadap Pengelolaan Persediaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai (Study Pada instalasi Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang).
- Manengkey, N. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi Pada PT.Cahaya Mitra Alkes.
- Mulyadi. (2016). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putu Ayu Yohana Putri, D. M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan).
- Ri'yati Najiyah, E. E. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi).
- Simanjuntak, P. (2020). Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dalam Menunjang Pengelolaan Persediaan Alat-alat Medis Di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabet.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas membahas tentang Obat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Self-Assessment System Effect on Revenue Optimization Pph Pasal 25 Corporate Taxpayer At The Sumedang Primary Tax Service Office

Rosi Imelya¹, Nining Kurniasih², Tiana Feny Krisdina³
Universitas Sebelas April Sumedang
Rosiiimelya30@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Keywords:

Optimizing income
tax revenue PPh
Pasal 25, self
assessment system

Self-assessment system is a form of government action to get tax revenue to be more optimal. The implementation of the self-assessment system requires the active role of the taxpayer, by voluntarily the taxpayer must register, calculate, pay and report his own tax payable to the KPP. However, it still has not met the tax revenue target. Purpose of this study was to determine how the effect of the self-assessment system on the optimization of income tax revenue PPh Pasal 25 corporate taxpayers at the Sumedang Pratama Tax Service Office. This research method uses quantitative descriptive with a survey approach. The sampling technique used simple random sampling method. The population of this research is corporate taxpayers registered at KPP Pratama Sumedang as many as 100 respondents. The data in this study were obtained primary (questionnaire). The analysis technique used is correlation coefficient analysis, simple regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing. The results showed that the implementation of the self-assessment system had a positive and significant effect on optimizing income tax revenue PPh Pasal 25. This was shown by the regression equation $Y = 8.574 + 0.814X$, and 9.429 tcount value > 1.984 t table with a value of sig. $0.000 < 0.05$ probability value. With a coefficient of determination of 47.6% and the remaining 52.4% is influenced by other factors.



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved.

Corresponding Author:

Rosi Imelya¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: Rosiiimelya30@gmail.com

1. INTRODUCTION

Salah satu sumber penerimaan Negara di Indonesia yaitu berasal dari pajak dengan menduduki peringkat tertinggi. Dari sekian banyak jenis dan golongan pajak, salah satu penerimaan pajak yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2008). Pajak penghasilan pasal 25 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dengan bayar secara angsuran. Dengan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019 : 313). Dan sistem yang digunakan untuk pajak penghasilan pasal 25 hingga kini masih menggunakan *self asesment system*. Pada Tahun 1983 di Indonesia terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assesment system*. Yang merupakan bentuk langkah pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak agar lebih optimal. Pada penerapan sistem *self assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Misman : 2016). Karena pada sistem ini fiskus hanya bertugas mengawasi dan melayani informasi mengenai prosedur perpajakan. Dan wajib pajak harus bersukarela untuk mendaftarkan diri (NPWP), menghitung besarnya terutang (SPT), membayar (SSP) dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke KPP. Untuk itu pada sistem ini diperlukan peraturan yang jelas dengan prosedur yang tidak rumit, formulir yang mudah dipahami

dan menggunakan sistem online untuk mempermudah wajib pajak dalam era digital ini. kelemahan akibat tata cara pelaksanaan *self assessment system* yang menuntut peran aktif masyarakat, yaitu terdapat kesalahan ketika menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi serta adanya indikasi kecurangan (www.ddtc.co.id).

Tabel 1. Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Tahun 2017 s.d 2020
Di KPP Pratama Sumedang
(Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2021)

Thn	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2017	11.194.401.000	15.467.397.216	138%
2018	12.383.159.000	13.736.529.882	111%
2019	19.541.784.000	30.651.228.122	157%
2020	34.373.566.000	26.725.748.012	78%

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa secara nominal optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang pada tiap tahunnya fluktuatif meskipun telah memenuhi target penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, namun hanya pada tahun 2020 tidak mencapai target penerimaan pajak. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan hanya mencapai sebesar 78% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan pemberian insentif kepada wajib pajak sebesar 30% pada tahun 2020 selama periode April s.d September. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada wajib pajak badan dan pelaku usaha yang berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama masa pandemi Covid-19 ini belum berhenti. Pajak penghasilan pasal 25 sebenarnya dapat di optimalkan kontribusinya. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan berdampak pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Sumedang.

Tabel 2. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Sumedang
Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2021

Tahun	WP yang terdaftar	Terdaf tar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2016	5.085	3.028	1.566	51,72%
2017	6.314	3.702	2.2	59,43%
2018	6.869	4.295	2.651	61,72%
2019	7.387	3.918	2.91	74,27%
2020	8.043	4.001	2.192	54,79%

Dapat dilihat pada tingkat kepatuhan di KPP Pratama Sumedang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT dengan realisasi SPT. Sehingga dapat diketahui mengapa realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan tidak terpenuhi di tahun 2020, salah satunya karena jumlah realisasi SPT menurun. Hal ini berarti masih ada wajib pajak badan yang tidak membayar pajak ataupun telat bayar SPT sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang menurun. Untuk itu pembayaran pajak penting karena semakin menurunnya tingkat kepatuhan akan berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Secara konseptual *self assessment system* merupakan cara terbaik pemerintah memungut pajak karena memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dan mandiri. Hanya saja pada sistem ini belum mampu untuk memberikan penerimaan pajak yang lebih optimal dari hasil yang di targetkan penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah. Permasalahan ini terjadi akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan tidak mau membayar pajak karena alasan tertentu. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dari

permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang. Peneliti ingin mengetahui pengaruh yang ditimbulkan *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. Mengingat secara nasional penerimaan pajak PPh pasal 25 terdapat kontribusi terhadap pajak penghasilan sebagai salah satu penerimaan pajak.

2. LITERATURE STUDY

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1. UU ini mendefinisikan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Pengertian *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan *Self Assessment System*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus. Adapun dasar hukum *self assessment system*. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”, dan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Menurut Rahayu (2020:111), terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah “Menghitung dan menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak keperpajakannya”. Indikator dalam penelitian ini untuk variabel independen yaitu *Self Assessment system* yang dijadikan pengukur keberhasilan atau tidaknya. Antara lain sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- b. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- d. Pelaporan Dilakukan Wajib Pajak

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik dan tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik dan paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi optimalisasi maknanya: langkah atau metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah sebuah upaya, langkah, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan (Ilyas dan Burton, 2013). Peneliti menggunakan indikator untuk variabel dependen yaitu optimalisasi penerimaan pajak yang dikemukakan Menurut Rahayu (2020 : 32). Faktor – faktor

yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Tingkat intelektual masyarakat
- c. Kualitas fiskus
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 25 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi kredit pajak.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan *survey* untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian *survey* ini, melakukan observasi, dan mendapat dokumentasi di KPP Pratama Sumedang. Dan peneliti melakukan menyebar kuisioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Sumedang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruh antar variabel independen dan dependen. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, yang berlokasi di Jl Kolonel Ahmad Syam Jalan No. 69A, Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan waktu penelitian yaitu dari Bulan 13 Januari hingga 13 Juli.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu *self assessment system*. Pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2019:11) adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”. Dan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel *self assessment system* menggunakan 4 indikator dari Rahayu (2020 : 111) dengan menggunakan skala likert. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25. Yang mana optimalisasi penerimaan pajak dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah upaya atau langkah yang mempengaruhi optimalisasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah dari yang bersumber dari pajak rakyat. Dan pada penelitian ini dibatasi hanya optimalisasi penerimaan pajak dalam negeri salah satunya pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang. Instrumen untuk mengukur variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25, menggunakan 4 indikator dari Rahayu (2020 : 33). Yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu 1). Sumber data primer dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak badan PPh Pasal 25 yang terdaftar di KPP Pratama Sumedang, 2). sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, 1). Observasi Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 2). Angket/kuisioner, dengan penyebaran angket dengan membuat daftar pertanyaan berkaitan dengan objek yang diteliti. 3). Dokumentasi, Mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan, maupun dari KPP Pratama Sumedang yaitu data realisasi penerimaan PPh Pasal 25. Dan yang terakhir Penelitian Kepustakaan mempelajari literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan mempelajari buku-buku referensi dan peneliti melakukan *browsing* pada situs-situs terkait

RESULT AND DISCUSSION

Uji Validitas

Dalam sebuah penelitian terdapat instrumen valid yang artinya hasil penelitian terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 25. Pada penelitian ini besarnya r tabel yaitu sebesar 0,1966, jika lebih besar (dari dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Rekapitulasi seluruh hasil uji validitas variabel *self assessment system* (X) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel *Self Assessment System* (X)

Sumber : Data Output SPSS yang telah diolah, 2021

No. pertanyaan			Keterangan
1	0,446	0, 1966	Valid
2	0,408		Valid
3	0,398		Valid
4	0,494		Valid
5	0,553		Valid
6	0,435		Valid
7	0,458		Valid
8	0,498		Valid
9	0,428		Valid
10	0,463		Valid

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa setiap item pertanyaan variabel *self assessment system* (X) dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Dapat dinyatakan valid karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai (0,1966) dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. Rekapitulasi seluruh hasil uji validitas variabel Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 (Y) disajikan pada tabel berikut : Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa setiap item pertanyaan variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan **valid**. Dapat dikatakan valid karenanya lebih besar dibandingkan dengan nilai dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dalam masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai sebesar 0,60. Perhitungan uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25, hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut ini : Berdasarkan perhitungan, terlihat bahwa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Pengaruh *Self Assessment System* 0,667. Nilai 0,667 lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel independen Pengaruh *Self Assessment System* dinyatakan **reliable** sehingga dapat digunakan berulang-ulang Berdasarkan perhitungan dengan spss 25,0, pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Optimalisasi Penerimaan PPh pasal 25 sebesar 0,632. Nilai 0,632 lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel dependen Optimalisasi Penerimaan PPh pasal 25 dinyatakan **reliable** sehingga dapat digunakan berulang-ulang.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* memiliki kriteria jika nilai sig. Atau probabilitas 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika sig. Atau probabilitas 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan

hasil uji normalitas kedua variabel penelitian adalah nilai *test statistic* sebesar 0,107 dengan asymp sig 0,092. Oleh karena itu nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data Variabel X dan data Variabel Y dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berdasarkan diagram P-P Plot pada Gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti yang terlihat pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa persebaran titik-titik masih berada disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal maka dinyatakan bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linier atau variabel. Rumus koefisien korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *product moment*. Hasil perhitungan penelitian ini diperoleh bahwa koefisien korelasi variabel *self assessment system* (X) dengan Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 (Y) bernilai $r = 0,690$. Menurut Sugiyono (2019 : 231), koefisien korelasi sebesar 0,690, termasuk kedalam ukuran **kuat**, ini berarti ada hubungan yang positif antara *self assessment system* dan optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan metode pendekatan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25, angka konsisten penerimaan Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 sebesar 8,574 dan angka koefisien dari variabel *self assessment system* bernilai positif sebesar 0,814 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa *self assessment system* (X) berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 8,574 + 0,814X$, yang berarti setiap penambahan 1 poin tingkat *self assessment system* (X) maka optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 akan meningkat sebesar 0,814. Sehingga semakin tinggi *self assessment system* maka akan semakin meningkatkan optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25.0 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,476 (nilai 0,476 adalah pengkuadratan dari korelasi atau R, yaitu $0,690 \times 0,690 = 0,476$). Hal ini berarti besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebesar 47,6% ($0,476 \times 100$) dan sisanya sebesar 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 berada pada skala penafsiran 17%-49% dan masuk dalam kategori cukup kuat.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hasil Pengujian Variabel Pengaruh *self assessment system* terhadap variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 diketahui nilai sebesar 9,429 sedangkan 1,984. Karena nilai thitung 9,429 > ttabel 1,984, dan nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

CONCLUSSION

1. Pelaksanaan *self assessment system* menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini karena secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikatornya dari hasil penyebaran kuesioner berada pada kategori Sangat Baik dengan skor 4671 dari skor ideal 5000 dilihat dari kegiatan *self assessment system* seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang dilakukan wajib pajak. Artinya pelaksanaan *self assessment system* di KPP Pratama Sumedang telah sesuai dengan diharapkan.
2. Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini karena secara keseluruhan berdasarkan indikator-

indikasinya dari hasil penyebaran kuesioner berada pada kategori Sangat Baik dengan skor 4660 dari skor ideal 5000 dilihat dari kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas fiskus dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Artinya Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang telah sesuai dengan diharapkan.

3. Pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan persamaan regresi $Y = 8,574 + 0,814X$, dan nilai thitung 9,429 > ttabel 1,984 dengan nilai sig. 0,000 < nilai probabilitas 0,05. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 adalah sebesar 47,6%. Hal ini berarti apabila *self assessment system* semakin baik maka akan mengakibatkan semakin baik optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

Saran

1. Bagi fiskus perlu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. karena apabila wajib pajak memahami pajak akan menciptakan kesadaran dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat maka akan berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak yang semakin baik. Salah satunya fiskus dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui media online maupun langsung untuk memberikan informasi kepada wajib pajak.
2. Pelayanan pajak perlu ditingkatkan lagi agar tidak menjadi kendala bagi wajib pajak melaporkan pajaknya. Terutama sistem online yang sering terjadi error sehingga memerlukan perbaikan, oleh karena itu perlu sekali ditingkatkan sistem onlinenya agar lebih baik lagi agar penerimaan pajak optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan.

REFERENCE

- Mardiasmo, 2019. "Perpajakan". Yogyakarta : ANDI
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan dan Konsep dan Aspek Moral Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2019. "Statistika untuk Penelitian". Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Aliah Ghina, Amalia Tresna Fadhilah, Eliza Indri Hafsari. 2020. Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 4 No. 3.
- Anti Azizah Aprilianti, Siska P. Yudowat, Kurnia. 2018. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian Akuntansi, Vol.19 No.2, PP 84 – 92.
- Desmon, dan Hairudin. 2020. Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 2, No. 1.
- Eliyah, Arles P. Ompusungu, Nur Hidayat. 2016. Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 3, No. 1.
- Harris, Topowijono dan Sri Sulasmiyati. 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014. Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1.
- Rosanna Purba. 2019. Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 04, No. 1.
- Rukmi Dewi Prastiwi. 2017. Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Jasa Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Akuntansi. Vol 3, No 5.
- Sofyeti Misman. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No. 04.
- UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Subjek Pajak Penghasilan.
Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Objek Pajak Penghasilan
Pasal 25 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 25 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Angsuran.
Pasal 12 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Dasar Hukum *Self Assessment System*.
Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dan Belanja Negara.
Pasal 25 Ayat 4 UU Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 25 Ayat 7 Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/ PMK.35 / 2018 Tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
Pasal 2 Direktur Jenderal Pajak No PER– 08/PJ/2020 Tentang PerhitunganAngsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Schubung dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran.
<https://news.ddtc.co.id/apbn-perubahan-2020-penerimaan-pajak-turun-2365-dari-target-awal-20078>. Retrived pada tanggal 23 Januari 2021
https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/direktorat-perencanaan-makro/contents-direktorat-perencanaan-makro/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia/?ccm_paging_p_b31092=2. Retrived pada tanggal 25 Januari 2021
<https://news.ddtc.co.id/kemudahan-yang-menyulitkan-dalam-sistem-self-assessment-11840>. Retrived pada tanggal 26 Januari 2021
<https://klc.kemenkeu.go.id/tag/penerimaan-negara/>. Di akses pada tanggal 24 Febuari 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all>. Retrived pada tanggal 24 Febuari 2021
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> Retrived tanggal 5 Maret 2021.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/12TAHUN2014UU.htm>Di Retrived tanggal 9 Maret 2021

Influence of Competence and Independent Auditors on The Quality of Audit

Rita Yulianida¹, Erpi Rahman², Aa Kartiwa³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

ritayulia7@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Keywords:

Auditor Competence,
Auditor Independence,
and Audit Quality

This study aims to determine: 1) the effect of auditor competence on audit quality; 2) The Effect of Auditor Independence on Audit Quality; 3) Correlation of Auditor Competence to Auditor Independence 4) Effect of Competence and Independence of Auditors together on Audit Quality. This research includes causal associative research, namely research with the characteristics of the problem in the form of a causal relationship between two or more variables. The population in this study is the Inspectorate of Sumedang Regency. Samples were taken as many as 23 auditors at the Sumedang Regency Inspectorate. Techniques Data collection is done by using the questionnaire method. The questionnaires were tested for validity and reliability before collecting research data. Prior to the analysis, the analysis prerequisite tests were carried out including linearity test, normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Analysis of the data used to test the hypothesis is to use simple regression analysis techniques and multiple regression analysis techniques. The results showed that: 1) There was a positive and significant effect of Internal Auditor Competence on Audit Quality with t count 7.856 > t table 2.093 and correlation coefficient of 0.874; 2) There is a positive and significant effect of Auditor Independence on Audit Quality with t count 4.221 > t table 2.093 and correlation coefficient of 0.696; 3) There is a correlation between Auditor Competence and Auditor Independence with a correlation coefficient of 0.629; 4) There is a positive and significant effect of Auditor Competence and Independence together on Audit Quality with F count 35.928 > F table 3.52 and the correlation coefficient is 0.894;



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved.

Corresponding Author:

Rita Yulianida,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: ritayulia7@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Wujud dari KKN tersebut yaitu penyelewengan wewenang, pungutan liar, uang pelicin, uang suap atau uang tutup mulut, sampai menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang banyak dilakukan oleh kebanyakan pejabat. Masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dengan sistem pengawasan internal yang lebih baik dan lebih ketat. Pengawasan tersebut juga dilakukan pada pengelolaan keuangan negara agar tidak memberikan kesempatan para pejabat untuk menyelewengkan uang tersebut. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di dalam sektor pemerintah terdapat aparat yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal audit pemerintah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara eksternal. Aparatur negara ini bertugas untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di badan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pada lingkup pemerintah daerah, Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik KKN. Aparat inspektorat dituntut untuk harus memiliki kompetensi dan independensi yang mempengaruhi kualitas audit agar menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Hasil audit yang berkualitas merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Menurut De Angelo (1981) dalam buku Mathius yang berjudul *Kualitas Audit dan Pengukurannya* (2016: 73) menyatakan bahwa, Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamzah Faid, Sukirno, Universitas Negeri Yogyakarta (2018) bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Sumedang,
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Sumedang,
- 3) Untuk mengetahui korelasi independensi auditor dengan kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Sumedang,
- 4) Untuk mengetahui bagaimanapun pengaruh kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Sumedang.

2. LECTURE STUDY

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada di lapangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi.

Kompetensi

Kompetensi menurut IAPI (2018), merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional ditempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh.

Independensi

Independensi menurut Mulyadi (2016:26) adalah Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Kualitas Audit

Kualitas Audit menurut DeAngelo 1981 (Mathius Tandiontong, 2016) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.

3. METHOD

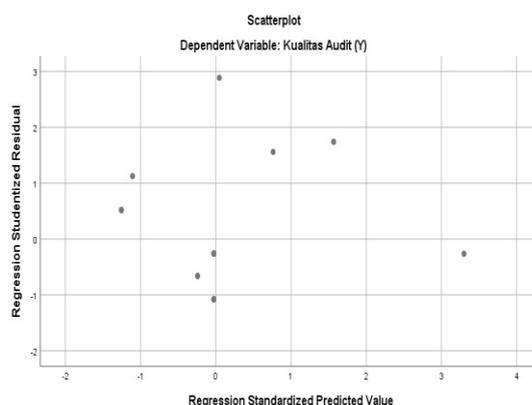
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode survey. Menurut Azuar Juliandi, Irfan, Sapri Manurung (2016:13) adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dengan menelaah sampel dari suatu populasi yang tersedia dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Hasil dari survey tersebut akan digunakan sebagai alat penjelasan dan juga sebagai data penguat deskriptif. Pengamatan/Observasi adalah kegiatan melihat suatu kondisi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yaitu dengan mengadakan

pengamatan langsung objek yang diteliti yaitu Inspektorat Sumedang. Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dan responden penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan'. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang

4. RESULT AND DISCUSSION

Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y linear atau tidak. Kriteria untuk pengujian ini adalah nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih besar dari taraf signifikansi *Deviation from Linearity* 0,05 maka antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dengan hasil uji linearitas diketahui nilai *Sig. deviation from linearity* di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *Deviation from Linearity* lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan terikat bersifat linear. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov (K-S) dengan hasil analisis didapatkan nilai signifikansi dari uji K-S sebesar 0,200. Angka tersebut lebih tinggi dari dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas yang artinya data Kompetensi dan Independensi Auditor Internal serta data Kualitas Audit berdistribusi normal. Hasil multikolinieritas pada tabel diatas didapatkan nilai tolerance sebesar 0,604 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,655 < 10,00 dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas yang artinya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas yaitu varibel Kompetensi Auditor dan variabel Independensi Auditor. Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis dengan menggunakan regresi ganda. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil heterokedastisitas dengan menggunakan Scatterplots dapat diketahui bahwa:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitas angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar atau menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, sehingga model regresi yang baik dapat terpenuhi.

Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Hasil analisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan tabel di atas, dengan analisis regresi sederhana diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) sebesar 0,874 dan R Square (R^2) sebesar 0,765. Hal ini berarti variabel kompetensi auditor mempengaruhi variabel kualitas audit sebesar R^2 atau sebesar 76,5%, sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan konstanta pada perhitungan spss 25.0, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan $Y = 0,621X_1 + 8,958$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,621 yang berarti apabila Kompetensi Auditor (X_1) meningkat 1 poin maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0,621 poin. Nilai statistik uji t yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai t table yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t yang diperoleh dari tabel distribusi t untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $dk = n - k - 1 = 21 - 1 - 1 = 19$. $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n - k - 1) = (0,025 ; 19) =$ sebesar $= 2,093$ hasil perhitungan statistik uji pada pengujian hipotesis dirangkum Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai thitung sebesar 7,856. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), nilai thitung lebih besar dari t_{tabel} 2,093 ($7,856 > 2,093$) dan koefisien korelasi (r) memiliki arah positif sebesar 0,874 maka hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang” diterima.

Hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Hasil analisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan menggunakan analisis regresi sederhana:

Tabel 1. Hasil Analisis

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	19,491	3,746	0,001
Independensi Auditor (X_2)	0,500	4,221	0,000
R		0,696	
R Square		0,484	

Berdasarkan tabel di atas, dengan analisis regresi sederhana diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) sebesar 0,696 dan R Square (R^2) sebesar 0,484. Hal ini berarti variabel independensi auditor mempengaruhi variabel kualitas audit (R^2) sebesar atau sebesar 48,4%, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan konstanta pada tabel di atas, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan $Y = 0,500X_2 + 19,491$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar 0,500 yang berarti apabila Independensi Auditor (X_2) meningkat 1 poin maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0,500 poin. Nilai statistik uji t yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai t table yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji t yang diperoleh dari tabel distribusi t untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $dk = n - k - 1 = 21 - 1 - 1 = 19$. $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n - k - 1) = (0,025 ; 19) =$ sebesar $= 2,093$.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai thitung sebesar 4,221. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), nilai thitung lebih besar dari t_{tabel} 2,093 ($4,221 > 2,093$) dan koefisien korelasi (r) memiliki arah positif sebesar 0,696 maka hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang” diterima.

Hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Terdapat korelasi antara kompetensi auditor terhadap independensi auditor pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan menggunakan analisis koefisien korelasi:

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 25.0, dengan analisis koefisien korelasi diperoleh nilai korelasi/hubungan antara kompetensi auditor dengan independensi auditor sebesar 0,629 dengan arah positif. Arah hubungan positif menggambarkan ketika Kompetensi Auditor (X1) meningkat maka Independensi Auditor (X2) akan meningkat pula. Kemudian besaran pengaruh Kompetensi Auditor (X1) terhadap Independensi Auditor (X2) ketika Kualitas Audit tetap adalah $(0,629)^2 \times 100\% = 39,5\%$.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,629 dengan arah positif, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Terdapat korelasi Antara kompetensi auditor terhadap independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang” diterima. Hipotesis keempat yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor dan independensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan menggunakan analisis regresi berganda: Berdasarkan hasil perhitungan, dengan analisis regresi berganda diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) sebesar 0,894 dan R Square (R^2) sebesar 0,800. Hal ini berarti variabel kompetensi auditor dan independensi auditor secara bersama mempengaruhi variabel kualitas audit sebesar (R^2) atau sebesar 80,0%, sedangkan sisanya sebesar 20,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien regresi dan konstanta pada tabel di atas, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan $Y = 6,996 + 0,514X_1 + 0,173X_2$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,514 yang berarti apabila Kompetensi Auditor (X_1) meningkat 1 poin maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0,514 poin dengan asumsi X_2 tetap. Koefisien X_2 sebesar 0,173 yang berarti apabila Independensi Auditor (X_2) meningkat 1 poin maka akan meningkatkan Kualitas Audit sebesar 0,173 poin dengan asumsi X_1 tetap. Sedangkan apabila nilai koefisien X_1 dan X_2 meningkat 1 poin maka Kualitas Audit (Y) akan meningkat sebesar 0,687 poin. Nilai statistik uji F yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai F tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji F yang diperoleh dari tabel distribusi t untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $k = n - k = 21 - 2 = 19$. $F_{tabel} = F(k; n - k) = F(2; 19) = 3,52$ hasil perhitungan statistik uji pada pengujian hipotesis dirangkum pada tabel sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 35,928. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), nilai F hitung lebih besar dari F_{tabel} 3,52 ($35,928 > 3,52$) dan koefisien korelasi (r) memiliki arah positif sebesar 0,894 maka hipotesis keempat yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor dan independensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang” diterima.

5. DISCUSSION

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa Kompetensi Auditor termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang”. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 7,856 lebih besar dari t tabel 2,093 ($7,856 > 2,093$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,874 yang memiliki arah positif yang berarti semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas audit juga semakin tinggi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,874 dan koefisien determinasi sebesar 0,765 (76,5%) yang berarti kompetensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Maulana (2020) dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Selain itu penelitian yang dilakukan Hamzah Faid Falatah (2018) dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat di Yogyakarta. Dengan demikian, peningkatan Kualitas Audit yang dihasilkan seorang auditor akan dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi tersebut. Semakin tinggi Kompetensi Auditor maka kemungkinan dikemukakannya kesalahan dalam pemeriksaan akan semakin besar sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan semakin baik.

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa Independensi Auditor termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang”. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 4,221 lebih besar dari t tabel 2,093 ($4,221 > 2,093$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,696 yang memiliki arah positif yang berarti semakin tinggi independensi auditor maka kualitas audit juga semakin tinggi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,696 dan koefisien determinasi sebesar 0,484 (48,4%) yang berarti independensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit sebesar 48,4% sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica Anastasya Joseph (2020) dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Selain itu penelitian yang dilakukan Hamzah Faid Falatah (2018) dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat di Yogyakarta. Dengan demikian, semakin tinggi Independensi Auditor maka akan semakin tinggi pula Kualitas Audit.

Korelasi Kompetensi Auditor Dengan Independensi Auditor

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Terdapat korelasi antara kompetensi auditor terhadap independensi auditor pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang”. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi/hubungan antara kompetensi auditor dengan independensi auditor sebesar 0,629 dengan arah positif. Arah hubungan positif menggambarkan ketika Kompetensi Auditor (X1) meningkat maka Independensi Auditor (X2) akan meningkat pula. Kemudian besaran pengaruh Kompetensi Auditor (X1) terhadap Independensi Auditor (X2) ketika Kualitas Audit tetap adalah $(0,629)^2 \times 100\% = 39,5\%$.

Pengaruh Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor dan independensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang”. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 35,928 lebih besar dari F tabel 3,52 ($35,928 > 3,52$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,894 yang memiliki arah positif yang berarti semakin tinggi kompetensi auditor dan independensi auditor maka kualitas audit juga semakin tinggi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,894 dan koefisien determinasi sebesar 0,800 (80,0%) yang berarti kompetensi auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit sebesar 80,0% sedangkan sisanya sebesar 20,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Faid Falatah (2018) dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa Kompetensi auditor dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat di Yogyakarta. Dengan demikian, semakin tinggi Kompetensi Auditor dan independensi auditor maka semakin baik *Kualitas Audit* yang dihasilkan.

6. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang)”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung adalah 7,856 dan t tabel sebesar 2,093. Sehingga t hitung $>$ t tabel yaitu ($7,856 > 2,093$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Artinya, bahwa kompetensi merupakan hal yang selalu diterapkan oleh para auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan terpercaya.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung adalah 4,221 dan t tabel sebesar 2,093. Sehingga t hitung $>$ t tabel yaitu ($4,221 > 2,093$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000

- ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Artinya, semakin baik independensi yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor juga semakin baik.
3. Terdapat korelasi kompetensi auditor dengan independensi auditor pada Inspektorat di Kabupaten Sumedang. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi/hubungan antara kompetensi auditor dengan independensi auditor sebesar 0,629 dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor semakin sifat independen seorang auditor tinggi.
 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung adalah 35,928 dan F tabel sebesar 3,52. Sehingga F hitung $>$ F tabel yaitu ($35,928 > 3,52$) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor dan independensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Sumedang”. Artinya, semakin baik kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor juga semakin baik.

REFERENSI

- Anastasya J, Jesicca. 2020. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. *Pengaruh Due Professional Care, Independensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit*. 1-20.
- Bala Dewa, Yogha. 2018. Jurnal Nominal. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Moral Reasoning Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 7(1): 82-95.
- Firdaus, Ridwan. 2017. *Pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Juliandi Azuar, Irfan, Saprinan Manurung. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan. Umsu Press.
- Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta. Yayasan Pendidikan Audit Internal.
- Maulana, Dikdik. 2020. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. *Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit*. 5 (1): 39-53.
- Melinawati, Argo P. 2020. Jurnal Akrab Juara. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit*. 5(3): 60-70.
- Mulyadi. 2016. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat.
- Prihanto, Hendi. 2018. *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*. Depok. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung. Alfabeta.
- Pengaturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/3/2008 LKIP Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2020
- Renstra Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
- Ahmad Nabhani. 2009. 72 LKPD Disclaimer, 556 Kasus Rugikan Rp 301 M. <https://economy.okezone.com/read/2009/05/18/277/220701/72-lkpd-disclaimer-556-kasus-rugikan-rp301-m>. Diakses tanggal 05 Januari 2021, 02:14:54 WIB.
- Priska Sari Pratiwi. 2018. Suap WTP Kemendes, Auditor BPK Dituntut 10 Tahun Penjara. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212204439-12-275734/suap-wtp-kemendes-auditor-bpk-dituntut-10-tahun-penjara>. Diakses tanggal 05 Januari 2021, 09:08:17 WIB.